

## BAB II. LANDASAN TEORI

Objek material yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kawasan cagar budaya Kauman Surakarta, sedangkan objek formalnya yaitu konservasi berkelanjutan.

### A. Kajian Pustaka

Kajian teoretis mengenai konservasi kawasan cagar budaya Kauman Surakarta diungkapkan dalam lima bagian utama yaitu pertama kajian yang terkait dengan konservasi, ke dua kajian tentang teori pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan konservasi kawasan berkelanjutan, ke tiga kajian tentang kawasan cagar budaya, ke empat kajian tentang teori sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jawa, serta ke lima menguraikan tentang kebaruan (*State Of The Art*) dari penelitian yang akan dilakukan.

#### 1. Konservasi

##### a. Pengertian Konservasi Kawasan

Konservasi merupakan istilah yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian. Pengertian konservasi yaitu berusaha untuk mempertahankan properti, simbol dan kenangan dari masa lalu, tanpa mengubah kondisi yang ada secara signifikan (Doby, 1978 : 16; Elsodary, 2012 : 380). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sidharta & Budihardjo (1989 : 9) dan The Burra Charter (2013 :1-2) yang menyatakan bahwa konservasi merupakan sebuah proses pemeliharaan dan pengelolaan suatu tempat yang bertujuan untuk mempertahankan agar signifikansi budaya serta makna kultural yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Signifikansi budaya yaitu nilai estetis, historis, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi masa lalu, sekarang, serta mendatang.

Definsi konservasi menurut UU No. 11 tahun 2010 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Ketetapan ini didukung oleh PerMenPU No. 18/PRT/M/2010 pasal 1, yang menyatakan bahwa pelestarian atau konservasi adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Dalam teorinya Kong & Yeoh (1994 : 263), menyatakan bahwa konservasi dalam sebuah perkotaan

mencakup interaksi historis, sosial, budaya dan politik. Penelitian dan artikel yang membahas tentang konservasi bisa dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Teori tentang konservasi kawasan

No.	Penulis/ Peneliti	Pokok Bahasan	Relevansinya dengan penelitian ini
1	Doby, 1978 : 16	Konservasi adalah berusaha untuk mempertahankan simbol dari masa lalu, kenangan kembali ke masa lalu yg telah berubah	Mempertahankan : • Simbol • Kenangan masa lalu
2	Sidharta & Budihardjo, 1989 : 9	Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yg dikandungnya terpelihara dengan baik	• Pengelolaan tempat  • Pemeliharaan makna kultural
3	Kong & Yeoh, 1994 : 263	Isu seputar konservasi kota (di Singapura) mencakup interaksi historis, sosial, budaya dan politik yang lebih luas	Interaksi historis, sosial, budaya dan politik
4	UU No. 11 tahun 2010.	Pelestarian/konservasi adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya	Mempertahankan dengan cara : • Melindungi • Mengembangkan • Memanfaatkan
5	PerMenPU No.18/PRT/M/2010 pasal 1	Pelestarian/konservasi adalah kegiatan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki	• Perawatan, • Pemugaran • Pemeliharaan • Mengembalikan Sesuai Aslinya
6	Elsodary, 2012 : 380	Konservasi didefinisikan sebagai proses mempertahankan properti tanpa mengubah kondisi yang ada secara signifikan	• Mempertahankan properti • Tanpa mengubah secara signifikan
7	Piagam Burra, 2013 : 1-2	Konservasi artinya adalah seluruh proses pemeliharaan sebuah tempat untuk mempertahankan signifikansi budayanya. Konservasi merupakan bagian integral pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan tanggung jawab yang berkesinambungan	• Pemeliharaan tempat • Mempertahankan signifikansi budaya • Tanggung jawab berkesinambungan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konservasi adalah proses pemeliharaan, perawatan, pemugaran serta pengelolaan sebuah tempat untuk mempertahankan signifikansi budayanya yang merupakan simbol dan kenangan dari masa lalu, agar makna kultural yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Upaya konservasi dalam mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dilakukan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya sesuai dengan aslinya tanpa mengubah secara signifikan. Upaya tersebut mencakup interaksi historis, sosial, budaya, politik dan merupakan tanggung jawab yang berkesinambungan.

#### **b. Jenis-jenis Konservasi**

Jenis-jenis konserasi ada beberapa macam, menurut Piagam Burra (2013 : 2-3) proses konservasi terdiri dari : pemeliharaan, preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan pemanfaatan. Pemeliharaan artinya perlindungan terus menerus pada sebuah tempat dan tata letaknya. Preservasi artinya mempertahankan sebuah tempat dalam kondisi

eksistingnya dan memperlambat pelapukan. Restorasi artinya mengembalikan sebuah tempat pada kondisi semula dengan menghilangkan pertambahan atau dengan menyusun ulang elemen yang ada tanpa pengenalan materi baru. Rekonstruksi artinya mengembalikan sebuah tempat pada kondisi semula dengan menggunakan material baru. Adaptasi artinya memodifikasi sebuah tempat disesuaikan dengan penggunaan yang ada atau penggunaan yang diusulkan. Pemanfaatan artinya memfungsikan sebuah tempat untuk berkegiatan, termasuk kegiatan dan kebiasaan tradisional dan adat yang mungkin terjadi. Pemanfaatan yang kompatibel berarti pemanfaatan yang menghormati signifikansi budaya suatu tempat. Salah satu dari jenis konservasi tersebut di atas bisa dipilih diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan.

Piagam Burra sesungguhnya telah disusun tahun 1979, kemudian direvisi tahun 1981, 1999 dan 2013. Dalam Piagam Burra tahun 1979 dan 1981, ditemukan istilah demoli, yang artinya adalah penghancuran atau perombakan suatu bangunan kuno yang telah rusak atau membahayakan. Istilah ini tidak ditemukan pada Piagam Burra yang telah direvisi pada tahun berikutnya, penghancuran bangunan kuno sedapat mungkin dihindarkan selama masih bisa dilakukan upaya konservasi yang lain.

Bentuk atau jenis konservasi diberi istilah yang berbeda-beda oleh beberapa peneliti, Sidharta dan Budihardjo (1989 : 11) mengistilahkan restorasi dengan “rehabilitasi” dan mengistilahkan adaptasi dengan “revitalisasi”. Sedangkan Priyatmojo menggunakan istilah *adaptive-reuse* atau “re-arsitektur” pada pemanfaatan bangunan kuno untuk menampung fungsi baru. Menurut Priyatmojo (2009 : 3 & 5), pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya hendaknya disertai dengan upaya revitalisasi dengan *adaptive-reuse* agar biaya pemeliharaan tidak membebani kota atau negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis konservasi terdiri dari pemeliharaan, preservasi, restorasi atau rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi atau revitalisasi dan pemanfaatan. Pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya hendaknya disertai dengan upaya revitalisasi, agar biaya pemeliharaan tidak membebani kota atau negara.

### **c. Revitalisasi Kawasan**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 18/PRT/M/2010 mendefinisikan revitalisasi kawasan adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi kawasan disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi

Penataan Bangunan dan Lingkungan. Esensi kegiatan revitalisasi ialah pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat, demikian dikemukakan dalam UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 31. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikansi dari kawasan yang mempunyai potensi dan/atau mengendalikan kawasan yang cenderung tidak teratur, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam ikatan kota sehingga berdampak pada kualitas hidup warganya, melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan (Biro Hukum Kementerian PU, 2011 : 12).

Ketetapan tersebut di atas didukung oleh pendapat Nur dan Herwandi (2009 : 6); Alimuddin (2011 : 1); serta Martokusumo (2008 : 2), yang menyatakan bahwa revitalisasi kawasan merupakan rangkaian upaya untuk menata, meningkatkan, serta mengembalikan vitalitas kawasan kuno yang memiliki potensi dan nilai strategis yang mengalami penurunan fungsi dan daya dukung, agar mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktifitas ekonomi, sosial dan budaya. Kegiatan revitalisasi dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh dengan sistem kota, terberdayakan pertumbuhan ruang ekonominya, meningkatkan prasarana, sarana dan kenyamanan lingkungan, terjaminnya kelestarian dan kemampuan daya dukung sumberdaya alam yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika kualitas suatu kawasan dapat mendukung kelangsungan hidup warganya, mendukung produktivitas sosial, budaya, ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya, area tersebut tergolong memiliki vitalitas kawasan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2010 Bab. 1 Pasal 1 ayat 5).

Revitalisasi dipahami sebagai suatu proses yang mengarahkan perwujudan suatu lingkungan binaan fisik yang layak, sesuai dengan aspirasi masyarakat, ramah terhadap lingkungan termasuk kepada kemampuan sumber daya setempat, daya dukung lahan dan merujuk pada lokalitas (Martokusumo, 2008 : 59). Lingkungan binaan kota dinilai sebagai ekosistem yang baik diukur dari kualitas lingkungan dan kehidupan yang baik bagi komunitasnya (sosio-kultural), tersedianya fasilitas lingkungan dan proses serta kegiatan ekonomi, dan kapasitas pendukung sumber daya (keseimbangan ekologis).



Sebuah tempat kuno bersejarah perlu direvitalisasi untuk mempertahankan makna budaya yang terdapat didalamnya, hal ini sesuai dengan pendapat Kyle & Walker (1992).

Tindakan revitalisasi merupakan fase proses non-linear yang melibatkan negosiasi yang sering dan intens antar para pemangku kepentingan (Tunbridge 1984; Rose 1986 yang dituliskan oleh Chung 2009 : 132). Tanpa adanya koordinasi yang baik, tindakan konservasi tidak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Untuk menilai tingkat keberhasilan pengelolaan revitalisasi kota warisan sejarah, dilakukan evaluasi terhadap prinsip-prinsip atau ketentuan yang berlaku, utilitas, material, dimensi, simbolik juga kondisi kultural setempat. Evaluasi dilakukan secara holistik agar menghasilkan penilaian yang valid dan obyektif, demikian diuraikan Zancheti dan Jokilehto 1997 yang dituliskan oleh Chung (2009 : 132). Hal ini sejalan dengan Chung (2009 : 154) yang menyatakan bahwa aspek revitalisasi terdiri dari empat bagian yakni : 1) definisi dan identifikasi; 2) alasan-alasan dan tujuan; 3) untuk siapa warisan dipertahankan dan; 4) strategi yang tepat untuk pemeliharaan, interpretasi dan manajemen yang efektif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi adalah upaya menghidupkan atau meningkatkan kembali nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikansi dari sebuah kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik, agar mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktifitas ekonomi, sosial dan budaya. Aspek revitalisasi terdiri dari empat bagian yakni : 1) definisi dan identifikasi; 2) alasan-alasan dan tujuan; 3) untuk siapa warisan dipertahankan dan; 4) strategi yang tepat untuk pemeliharaan, interpretasi dan manajemen yang efektif. Untuk menilai tingkat keberhasilan pengelolaan revitalisasi, dilakukan evaluasi terhadap prinsip-prinsip atau ketentuan yang berlaku, utilitas, material, dimensi, simbolik dan kondisi kultural setempat.

Bentuk revitalisasi ada dua macam yakni rekonstruksi dan adaptasi. Rekonstruksi merupakan upaya mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama maupun baru, sesuai informasi kesejarahan yang diketahui. Sedangkan adaptasi yaitu mengubah bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa menuntut perubahan drastis (Kasdi, 2013 : 4). Sidharta dan Budihardjo (1989 : 10) mendukung pendapat ini, yang menyatakan bahwa adaptasi adalah sebuah upaya memodifikasi

sebuah tempat untuk penggunaan yang berbeda, tanpa merubah makna kulturalnya untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Dengan dilakukannya revitalisasi, keberlanjutan budaya dan pemanfaatan ekonomi saling terkait. Kegiatan pengembangan nilai budaya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ayiran, 2011 : 82). Revitalisasi dapat dilakukan dengan mengganti fungsi bangunan yang ada di kawasan cagar budaya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dengan tetap mempertahankan keaslian bentuk dan makna kultural yang terkandung di dalamnya, upaya ini diistilahkan negosiasi oleh Doby (1978 : 139). Hal ini sejalan dengan pendapat Priyatmojo (2009 : 3), yang memanfaatkan bangunan kuno untuk menampung fungsi (penggunaan) baru dengan melakukan penambahan secara selektif sepanjang tidak merusak wajah atau citra bangunan aslinya. Wacana ini dikenal dengan pendekatan "re-arsitektur" atau "*adaptive-reuse*". Priyatmojo (2009 : 3) menyatakan bahwa upaya revitalisasi yang dilaksanakan mengandung tiga unsur perlakuan, yaitu: (1) Konservasi, berupa pemeliharaan serta perbaikan bagian yang rusak; (2) pemberian nilai ekonomi, yaitu penambahan atau perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masa kini merubah BCB" dari "*cost center*" menjadi "*profit center*"; (3) pemilihan jenis penggunaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Teori senada dikemukakan oleh Surbakti (2007 : 4), yang mencontohkan kasus penanganan revitalisasi dengan mentransformasikan modal budaya (*cultural capital*) menjadi modal ekonomi (*economic capital*). Teknik konservasi yang dilakukan adalah dengan pengembangan pariwisata, karena konservasi tidak akan berarti bila tidak menguntungkan secara ekonomi. Makna pelestarian pusaka budaya terkait dengan tuntutan hak budaya (*cultural rights*), baik untuk pelestarian itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata dan manfaatnya bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pusaka budaya merupakan sumber daya budaya yang memiliki berbagai nilai dan makna antara lain nilai dan makna informasi atau ilmu pengetahuan, ekonomi, estetika, dan asosiasi atau simbolik dan lain-lain.

## **2. Pembangunan Berkelanjutan**

### **a. Pengertian Dan Aspek Dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Definisi *sustainability* menurut buku laporan dari Komisi Dunia tentang Lingkungan Dan Pembangunan "*our common future*" (1987 : 41-42) adalah memenuhi kebutuhan masa kini dengan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan memenuhi dasar

kebutuhan sosial-budaya, ekonomi dan ekologis serta memperluas kesempatan memenuhi aspirasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik.

Kebutuhan manusia setiap saat selalu meningkat, untuk itu diperlukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan berkelanjutan dilakukan agar pemenuhan kebutuhan tersebut tidak merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi generasi yang akan datang. Definisi *sustainable development* menurut Forum For The Future United Kingdom (2003 : 13) adalah bagian dari kemajuan manusia yang mempunyai kapasitas berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan menurut UU No. 32 Tahun 2009 Bab. I Pasal 1 Ayat 3 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Teori tersebut diatas diperinci oleh Pemerintah Inggris, yang mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mempertemukan empat kepentingan sebagai berikut : kemajuan sosial yang mengakomodasi kebutuhan semua orang, melestarikan daya dukung lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan memelihara stabilitas pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pada intinya, pembangunan dikatakan dapat berkelanjutan apabila mempertemukan secara serempak kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan (Johnson, et. al., 2011 : 7). Konsep pembangunan berkelanjutan menyediakan pembangunan yang seimbang antara ketercapaian target sosio-ekonomi dan daya dukung lingkungan, sehingga kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka demikian dikemukakan oleh Saric, Jovanović dan Grujić (2013 : 23). Cara-cara baru pembangunan berkelanjutan dapat dipikirkan berdasarkan pengalaman membangun, dari arsitektur vernakular maupun modern (Sudarwani, 2012 : 7).

Blank (2012 : 7) menyatakan bahwa skenario utama pembangunan berkelanjutan yakni dengan mendorong teknologi sebaik-baiknya untuk mengatasi kendala sosial ekonomi dan politik, mendambakan sebuah dunia berkelanjutan dalam lingkungan serta sosial yang menjanjikan kualitas hidup layak bagi semua orang. Langkah-langkah dan kebijakan *bottom-up* perlu dilakukan disesuaikan dengan masing-masing isu, negara, dan sektor. Teori tersebut didukung oleh Chiotinis (2006 : 593) yang menyatakan bahwa langkah-langkah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk melestarikan keberlanjutan daya dukung lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem. Kerusakan

lingkungan yang terjadi saat ini dikarenakan cara masyarakat dalam membangun hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin, yang kemudian berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada.

Teori Rahayu, Bambang & Hardiman (2012 : 27), menyatakan bahwa penentuan indeks status keberlanjutan ditinjau dari empat dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial dan infrastruktur. Teori senada dikemukakan oleh Agustina (2007 : 44), yang menyatakan bahwa indikator keberlanjutan ditentukan dari tiga aspek yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi lima aspek yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya dan keterlibatan. Aspek sosial meliputi pelestarian nilai budaya, penguatan identitas dan citra; aspek ekonomi meliputi pengelolaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; aspek lingkungan meliputi permukiman, batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan polusi, prasarana lingkungan, konservasi sumber daya, ruang terbuka dan RTH; aspek sumber daya meliputi transportasi massal bukan mesin, mendaya gunakan pencahayaan dan penghawaan alami, optimalisasi lahan dan bangunan; aspek keterlibatan meliputi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta.

Dalam teorinya Krantz (2001:6), menyatakan bahwa gagasan penghidupan berkelanjutan adalah cara menghubungkan pertimbangan sosioekonomi dan ekologis secara kohesif, relevan dengan kebijakan terkait. Teori ini didukung oleh Riddell, (2004 : 14) yang menyatakan bahwa PBB bidang Lingkungan pada tahun 1992 memperluas konsep dengan “pengembangan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pemberantasan kemiskinan”. Keberlanjutan ditekankan pada kualitas lingkungan yang baik, tanpa kehilangan kesejahteraan, dan menunjukkan keuntungan sosial. Selanjutnya Howell (dalam Riddell, 2004:15) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang sehat tidak mungkin dilakukan tanpa lingkungan yang sehat; dan sebaliknya lingkungan yang sehat terancam oleh pembangunan yang tidak sehat.

Aulia (2005 : 35) membahas tentang prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan untuk sebuah kawasan permukiman, yang diartikan sebagai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan tempat hidup semua orang. Teori senada dikemukakan oleh Chiotinis (2006 : 593) yang menyatakan bahwa langkah-langkah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk melestarikan keberlanjutan daya dukung lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem. Pembangunan berkelanjutan mencakup keadilan, masalah ekonomi dan lingkungan



(Andersson, 2006 : 34). Keberlanjutan berfokus pada masalah ekonomi dan sosial, dan penggunaan sumber daya alam. Robert Allen (1980) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang cenderung mencapai kepuasan manusia dan perbaikan kualitas hidup manusia (Pisani, 2006:92). Teori yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Teori tentang pembangunan berkelanjutan

No. (1)	Penulis/ Peneliti (2)	Pokok Bahasan yang terkait dengan penelitian ini (3)	Relevansinya dengan penelitian ini (4)
1	<i>Our common future</i> , 1987 : 41-42	Definisi <i>sustainability</i> yaitu pembangunan berkelanjutan yang memenuhi dasar kebutuhan sosial-budaya, ekonomi dan ekologis serta memperluas kesempatan memenuhi aspirasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sosial-budaya</li> <li>• ekonomi dan</li> <li>• ekologis</li> </ul>
2	Krantz, 2001: 6	Gagasan penghidupan berkelanjutan adalah cara menghubungkan pertimbangan sosioekonomi dan ekologis secara kohesif, relevan dengan kebijakan terkait. PBB bidang Lingkungan 1992 memperluas konsep dengan pengembangan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pemberantasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sosioekonomi dan ekologis</li> <li>• relevan dengan kebijakan terkait</li> </ul> <p>Livelyhood :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan</li> <li>• pengelolaan sumber daya berkelanjutan</li> <li>• pemberantasan kemiskinan</li> </ul>
3	Forum For The Future United Kingdom, 2003 : 13	Definisi <i>sustainable development</i> adalah bagian dari kemajuan manusia yang mempunyai kapasitas berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pemenuhan kebutuhan tidak merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi generasi yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak merusak lingkungan</li> <li>• berkelanjutan</li> </ul>
4	Riddell, 2004:14-15	Keberlanjutan ditekankan pada kualitas lingkungan yang baik, tanpa kehilangan kesejahteraan, dan menunjukkan keuntungan sosial. Pembangunan ekonomi dan sosial yang sehat tidak mungkin dilakukan tanpa lingkungan yang sehat; dan sebaliknya lingkungan yang sehat terancam oleh pembangunan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kualitas lingkungan</li> <li>• kesejahteraan/ekonomi</li> <li>• sosial</li> </ul>
5	Aulia, 2005 : 35	Prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan untuk sebuah kawasan permukiman diartikan sebagai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan tempat hidup semua orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memperbaiki kondisi sosial</li> <li>• ekonomi</li> <li>• kualitas lingkungan</li> </ul>
6	Chiotinis, 2006 : 593	Langkah-langkah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk melestarikan keberlanjutan daya dukung lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melestarikan daya dukung lingkungan</li> <li>• sumber daya alam</li> <li>• ekosistem</li> </ul>
7	Andersson, 2006 : 34	Pembangunan berkelanjutan mencakup keadilan, masalah ekonomi dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keadilan</li> <li>• ekonomi</li> <li>• lingkungan</li> </ul>
8	Pisani, 2006:92	Keberlanjutan berfokus pada masalah ekonomi dan sosial, dan penggunaan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang cenderung mencapai kepuasan manusia dan perbaikan kualitas hidup manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ekonomi dan sosial,</li> <li>• penggunaan SDA</li> <li>• kepuasan manusia</li> <li>• perbaikan kualitas hidup</li> </ul>

9	Agustina, 2007 : 44	Indikatornya ditentukan oleh aspek sosial (pelestarian nilai budaya, penguatan identitas dan citra); aspek ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat); aspek lingkungan (permukiman, batas wilayah, penanggulangan polusi), prasarana lingkungan, konservasi sumber daya, ruang terbuka dan RTH); aspek sumber daya (transportasi massal bukan mesin, mendaya gunakan pencahayaan dan penghawaan alami, optimalisasi lahan dan bangunan); aspek keterlibatan meliputi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta	Indikatornya, aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sosial</li> <li>• ekonomi,</li> <li>• lingkungan,</li> <li>• sumber daya</li> <li>• keterlibatan</li> </ul>
10	Johnson, et. al., 2011 : 7	Pembangunan berkelanjutan mempertemukan empat kepentingan: kemajuan sosial yang mengakomodasi kebutuhan semua orang, melestarikan daya dukung lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan memelihara stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dikatakan dapat berkelanjutan apabila mempertemukan secara serempak kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kemajuan sosial (mengakomodasi kebutuhan)</li> <li>• melestarikan daya dukung lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana</li> <li>• memelihara stabilitas ekonomi</li> </ul>
11	Blank, 2012:7	Skenario utama sustainability dengan mendorong teknologi sebaik-baiknya untuk mengatasi kendala sosial ekonomi dan politik. Mendambakan sebuah dunia yang lebih berkelanjutan dalam lingkungan dan sosial yang menjanjikan kualitas hidup yang layak bagi semua orang. Langkah-langkah dan kebijakan bottom-up perlu dilakukan disesuaikan dengan masing-masing isu, negara, dan sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teknologi</li> <li>• sosial-ekonomi</li> <li>• politik</li> <li>• lingkungan</li> <li>• kebijakan bottom-up</li> </ul>
12	Rahayu, dkk., 2012 : 27	Penentuan indeks status keberlanjutan ditinjau dari empat dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ekologi,</li> <li>• ekonomi,</li> <li>• sosial</li> <li>• infrastruktur</li> </ul>
13	Saric Saric, Jovanović dan Grujić, 2013 : 23	Konsep pembangunan berkelanjutan menyediakan pembangunan yang seimbang antara ketercapaian target sosio-ekonomi dan daya dukung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sosio-ekonomi</li> <li>• daya dukung lingkungan</li> </ul>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah merupakan pemenuhan kebutuhan yang seimbang antara sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan tanpa merusak lingkungan serta tidak berdampak negatif bagi generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berupaya untuk memperbaiki sosioekonomi, keadilan dan kualitas lingkungan secara kohesif dengan ketahanan jangka panjang daya dukung lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem lokal-global, yang relevan dengan kebijakan terkait. Indikator pembangunan berkelanjutan meliputi aspek sosial-budaya; aspek ekonomi; aspek lingkungan; aspek sumber daya; aspek keterlibatan; aspek infrastruktur; aspek teknologi; aspek kebijakan terkait.

#### **b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ada 17, yaitu : 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; 5)

kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 10) berkurangnya kesenjangan; 11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) penanganan perubahan iklim; 14) ekosistem laut; 15) ekosistem daratan; 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; 17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Ranah yang terkait dengan penelitian ini adalah poin ke 11, yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan bertujuan menjadikan kota inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Poin 11.4 menjelaskan tujuan yang lebih khusus, yaitu memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia (UCLG & ASPAC, 2015 : 4 & 16).

Penjelasan dari poin ke 11 SDGs bahwa kota adalah pusat untuk ide, perdagangan, budaya, sains, produktivitas, pembangunan sosial, dan banyak lagi. Yang terbaik, kota telah memungkinkan orang untuk maju secara sosial dan ekonomi. Namun, banyak tantangan yang ada untuk mempertahankan kota dengan cara yang terus menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran sementara tidak menyita tanah dan sumber daya. Tantangan yang dihadapi kota dapat diatasi dengan cara yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan berkembang, sambil meningkatkan penggunaan sumber daya dan mengurangi polusi dan kemiskinan (United Nations in Indonesia, 2015).

Selanjutnya dikemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan kombinasi seperangkat faktor yang saling berhubungan (budaya, lingkungan, sosial, dan ekonomi). Pengembangan kebijakan khusus di masing-masing daerah adalah penting, serta pendekatan transversal dan terintegrasi di semua empat bidang. Pengembangan budaya didasarkan pada interaksi dan kerja sama dari berbagai macam aktor yang membentuk ekosistem budaya (termasuk lembaga publik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta), dengan cara yang mendorong inovasi (UCLG, 2015 : 5). Lanskap budaya dapat berperan positif dalam pembangunan berkelanjutan jika mampu menghasilkan kontribusi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perkotaan. Investasi warisan budaya berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas lokal secara keseluruhan, kesejahteraan penduduk dan menarik pendanaan dari sektor publik dan swasta. Bukti empiris menunjukkan bahwa konservasi warisan budaya akan meningkatkan investasi dan bukan pembiayaan (Nocca, 2017 : 6).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poin ke 11 SDGs, kota dan permukiman yang berkelanjutan bertujuan menjadikan kota inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Secara khusus bertujuan memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia. Kota adalah pusat untuk ide, perdagangan, budaya, sains, produktivitas, pembangunan sosial, yang memungkinkan orang untuk maju secara sosial dan ekonomi. Kota akan terus berkembang, sambil meningkatkan penggunaan sumber daya dan mengurangi polusi dan kemiskinan.

### c. Arsitektur Berkelanjutan

Konsep terapan dalam bidang arsitektur pendukung pembangunan berkelanjutan dinamakan *sustainable architecture*, merupakan konsep mempergunakan material sedemikian rupa untuk mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama. Konsep ini mengaitkan umur potensi vital sumber daya alam dengan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim, pertanian, industri, kehutanan dan arsitektur (Chiotinis, 2006 : 596). Thiebat (2011 : 177), menjelaskan bahwa arsitektur berkelanjutan juga melibatkan lingkungan, aspek sosial dan juga aspek ekonomi.

Teori sejenis dikemukakan oleh Loftness, Hakkinen, Adan dan Nevalainen (2007 : 969), yang mengemukakan bahwa desain arsitektur berkelanjutan merupakan sebuah proses dimana lingkungan buatan secara ekologis mencapai keseimbangan baru ke arah kelayakan *viability* pembangunan jangka panjang dan humanisasi arsitektur. Proses ini secara alami menggunakan sumber daya minimum solusi dari masa lalu dengan teknologi inovatif masa kini. Desain arsitektur berkelanjutan memperkenalkan bahan aman, *nonpolluting* dengan kebutuhan energi operasi lebih rendah dengan ketahanan lebih tinggi, daur ulang dan menawarkan nilai arsitektur jangka panjang. Sejalan dengan teori tersebut Ozorhon, (2014 : 176 & 186), mengemukakan bahwa desain arsitektur berkelanjutan mempertimbangkan kelestarian sumber daya dan efisiensi energi, struktur dan material yang sehat, memperhatikan penggunaan tanah secara ekologis dan bermakna social, pelestarian dan peningkatan keanekaragaman hayati dan menggabungkan mereka semua dalam sebuah inspirasi pemikiran, memvalidasi dan menambahkan nilai sensitivitas estetika. Desain arsitektur berkelanjutan secara signifikan mengurangi efek samping dari manusia pada lingkungan alam dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan ekonomi.

Teori desain yang berwawasan lingkungan juga dikemukakan oleh Hendrickson (1999 : 2), yakni konsep *green design* yang membuat produk dan prosedur desain



arsitektur konvensional dan manufaktur dengan mempertimbangkan isu-isu lingkungan secara sistematis dan efektif. Konsep arsitektur hijau ini diperlukan antara lain untuk membersihkan polusi dan pengolahan air limbah yang berkelanjutan. Tiga tujuan desain hijau untuk mencapai masa depan yang berkesinambungan sebagai berikut.

- 1) Mengurangi atau meminimalkan penggunaan sumber daya tak terbarukan.
- 2) Mengatur sumber daya terbarukan untuk menjamin keberlanjutan.
- 3) Mengurangi, dengan tujuan untuk menghilangkan emisi beracun yang berbahaya untuk lingkungan, termasuk emisi yang memberikan kontribusi bagi pemanasan global.

Konsep arsitektur berwawasan lingkungan juga dikemukakan oleh Frick dan Suskiyatno (2007 : 52), yakni konsep arsitektur ekologis. Lingkup arsitektur ekologis meliputi arsitektur biologis (memperhatikan kesehatan penghuni), arsitektur alternatif (memanfaatkan bahan ramah lingkungan), arsitektur matahari (memanfaatkan energi surya), arsitektur bionik (konstruksi/pembangunan alam) serta pembangunan berkelanjutan. Adapun unsur pokok eko-arsitektur terdiri dari udara, air, tanah dan energi.

Konsep serupa yang terkait dengan perkotaan dikemukakan oleh Sobandi (2011 : 9), yakni *eco-cultural city* berarti kota budaya yang berwawasan lingkungan. Sobandi menggunakan strategi untuk menerapkan *eco-cultural city* dengan kesejahteraan berbasis budaya, lingkungan berkelanjutan dan sosial. Konsep ini bisa dijadikan masukan dalam penelitian ini, karena kawasan merupakan bagian dari kota. Strategi kesejahteraan berbasis budaya, meliputi penguatan identitas lokal, berusaha dengan budaya, berbudaya di ruang terbuka. Strategi lingkungan berkelanjutan meliputi kota di hulu sungai dan mobilitas berkelanjutan. Strategi sosial meliputi kehandalan dan kelangsungan wong Solo, kota harmonis.

Kauman merupakan sebuah kawasan permukiman, konsep pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan permukiman dikemukakan oleh Aulia (2005 : 35), yang menyatakan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan untuk sebuah kawasan permukiman yaitu upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan tempat hidup masyarakat. Teori yang mendukung dikemukakan oleh Agustina (2007 : 44), yang menyatakan bahwa indikator keberlanjutan ditentukan dari tiga aspek yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi lima aspek yaitu sosial, ekonomi,

lingkungan, sumber daya dan keterlibatan. Aspek sosial meliputi pelestarian nilai budaya, penguatan identitas dan citra; aspek ekonomi meliputi pengelolaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; aspek lingkungan meliputi permukiman, batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan polusi, prasarana lingkungan, konservasi sumber daya, ruang terbuka dan RTH; aspek sumber daya meliputi transportasi massal bukan mesin, mendaya gunakan pencahayaan dan penghawaan alami, optimalisasi lahan dan bangunan; aspek keterlibatan meliputi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta.

Pada intinya teori-teori tersebut di atas menekankan pada pembangunan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan sebagai berikut.

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan bangunan.
- 2) Memperhatikan kesehatan penghuni.
- 3) Memanfaatkan bahan ramah lingkungan.
- 4) Meminimalkan penggunaan sumber daya tak terbarukan.
- 5) Mengatur dan mengurangi penggunaan sumber daya untuk keberlanjutan.
- 6) Memanfaatkan energi alami (matahari & angin).
- 7) Konstruksi dan pembangunan berbahan alami.
- 8) Mengurangi emisi B3.
- 9) Mempertimbangkan sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Teori tentang budaya yang terkait dengan arsitektur dikemukakan oleh Pitana (2013: 3), yang menyatakan bahwa budaya memiliki 'bahasa ibu' dalam mengungkapkan estetikanya, yaitu kearifan lokal. Kebudayaan didefinisikan sebagai suatu sistem atau gagasan, ide, *action*, *artefact* dalam masyarakat serta tindakan tertentu yang terungkap dalam sesuatu aktivitas. Teori ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat yang mendiskripsikan budaya sebagai keseluruhan sistem atau gagasan, ide, *action*, *artefact* dalam masyarakat yang dijadikan sebagai milik bersama (Koentjaraningrat dalam Rohadi, 2011 : 17).

Kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan. Altman dan Chemers (1980 : 4) menjelaskan bahwa lingkungan fisik terbagi menjadi dua yakni : lingkungan natural yang terdiri dari tempat-tempat dan kondisi geografis seperti gunung, lembah, laut serta kondisi lingkungan seperti suhu dan curah hujan, flora dan fauna; serta lingkungan buatan hasil rekayasa manusia yang terdiri dari rumah, perkotaan, pertanian dan lain-lain. Masyarakat, lingkungan fisik dan budaya bercampur menjadi sebuah

kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Logika ekologi-budaya dalam arsitektur berkelanjutan menekankan reorientasi fundamental nilai yang membahas tentang lingkungan dan budaya, dengan melestarikan keragaman budaya yang ada. Bangunan yang berkelanjutan harus berhubungan dengan konsep lokalitas dan tempat atau *genius loci*, dimaksudkan untuk menangkal *international style* yang gagal bersesuaian dengan nilai-nilai budaya lokal. Merupakan tanggung jawab etis untuk melawan fenomena universalisasi budaya modern, dengan upaya mengkontinuitaskan budaya tersebut melalui penggunaan kembali teknik konstruksi tradisional, tipologi bangunan, pola permukiman dalam kaitannya dengan penggunaan material dan tanggapan terhadap iklim (Guy dan Farmer, 2001 : 144).

#### **d. Konservasi Kawasan Berkelanjutan**

Kajian konservasi kawasan berkelanjutan dilakukan karena pada KCB Kauman saat ini telah terjadi degradasi lingkungan, yakni kerusakan ekologis fisik kawasan (bangunan, lahan dan infrastruktur) serta kenyamanan yang diakibatkan oleh panjangnya usia bangunan dan kawasan serta tidak terawatnya lingkungan. Pengatasan masalah ini tidak hanya diperlukan untuk saat ini, akan tetapi berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

Revitalisasi merupakan salah satu bentuk dari konservasi. Solikhah (2011 : 16), menyatakan bahwa revitalisasi kawasan yang berkelanjutan (*sustainable revitalization*) terdiri dari keseimbangan antara karakteristik fisik, pemanfaatan potensi ekonomi, dan kelestarian nilai sosial. Revitalisasi berkelanjutan berfokus pada dimensi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dengan pendekatan holistik dapat mencegah efek negatif dari urbanisasi dan globalisasi. Temuan menunjukkan bahwa data persepsi, citra dan pendapat dari masyarakat pengguna dapat berkontribusi pada dimensi fisik, sosial, ekonomi dan tata kelola strategi revitalisasi berkelanjutan. Data ini juga dapat mempengaruhi (1) penentuan tujuan dan sasaran, (2) perencanaan dan perancangan dan (3) tahap pengelolaan proses revitalisasi yang berkelanjutan (Gedik & Yildiz, 2016 : 195). Setyaningsih (2015 : 6-10) mengembangkan kampung wisata berkelanjutan dalam rangka revitalisasi kawasan dengan mempertimbangkan konsep-konsep : sirkulasi, penghijauan, komponen penanda lanskap kawasan, arsitektur, pengembangan infrastruktur, konservasi air tanah dan manajemen persampahan.

Teori Tam, Fung dan Sing (2016 : 635) mendukung teori di atas, mengemukakan bahwa menyeimbangkan konflik antara warisan budaya dan pembangunan merupakan topik penting bagi masyarakat kita di seluruh dunia. Di banyak negara, bangunan bersejarah yang dimanfaatkan untuk penggunaan ekonomis lebih terpelihara dengan baik. Lui Seng Chun adalah bangunan bersejarah kelas satu di Hong Kong. Untuk mendorong pariwisata budaya dan penggunaan yang baik, pemerintah telah mengundang organisasi nirlaba untuk menerapkan revitalisasi bangunan bersejarah melalui skema kemitraan. Bangunan bersejarah ini dialokasikan untuk keperluan budaya atau komersial. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada solusi fisik, spasial, sosial, budaya dan ekonomi yang tidak sesuai untuk mencegah semua tingkat dan bidang yang mengarah pada pergeseran negatif. Hal ini membutuhkan mempertimbangkan desain arsitektur berkelanjutan, yang merupakan proses berulang dan tahan lama. Konsep revitalisasi berkelanjutan berbasis historis budaya dan perekonomian sangat penting diperhatikan oleh para ahli dan pejabat perkotaan (Irani, 2014 : 647).

Sesungguhnya bangunan dan kawasan cagar budaya memiliki citra tersendiri dan dapat memberi keuntungan *brand image* kepada pemiliknya bila digunakan sebagai tempat usaha. Hanya dengan fungsi baru yang mendatangkan profit sajalah, benda cagar budaya tersebut bisa dipertahankan. Kegiatan pengembangan cagar budaya jangan hanya memperhatikan fungsional ekonomisnya saja, tapi faktor ekologis juga harus diperhatikan karena mempengaruhi kondisi fisik bangunan dan kawasan yang bersangkutan (Panggabean, 2014 : 27). Untuk merevitalisasi kawasan secara berkelanjutan, tidak hanya mementingkan potensinya saja akan tetapi juga dengan menelaah penurunan kinerja kawasan, yang menurut Martokusumo (2008 : 63-64) meliputi faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Struktur fisik, yakni penurunan fisik kawasan karena faktor usia, cuaca, mekanisme perawatan yang buruk.
- 2) Fungsi, yakni faktor internal bangunan tidak bisa mendukung kebutuhan yang ada sedangkan faktor eksternal adalah perlunya modifikasi yang berkaitan dengan kinerja bangunan.
- 3) Aspek legal dan institusi kelembagaan, yakni penurunan fungsi, fisik dan citra dapat disebabkan oleh kebijakan pembangunan atau pemintakatan yang tidak tepat.



- 4) Citra, yang berkaitan dengan persepsi publik. Yakni perubahan nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat akan mempengaruhi pemanfaatan dan pengelolaan aset perkotaan.
- 5) Lokasi, yakni degradasi lingkungan bangunan dan lingkungan diakibatkan oleh perubahan pola distribusi, konsumsi dan aksesibilitas.
- 6) Finansial atau ekonomi.

Secara spesifik dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut.

- 1) Kondisi lingkungan yang buruk dan tidak layak dihuni, ditinjau dari segi infrastruktur fisik dan sosial. Mempercepat degradasi proses lingkungan dan kontra produktif bagi kehidupan sosial budaya yang sehat.
- 2) Tingkat kepadatan bangunan dan manusia yang melebihi batas daya dukung lahan dan kemampuan infrastruktur yang ada.
- 3) Efektifitas pemanfaatan lahan rendah, akibat terjadinya penurunan aktivitas.
- 4) Lahan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, karena letaknya yang strategis dengan percepatan pembangunan yang tinggi.
- 5) Batasan luas lahan yang cukup, harga memadai dan proses pembebasan lahan memungkinkan.
- 6) Memiliki aset lingkungan yang menonjol, seperti bangunan dan lingkungan bersejarah yang tak tergantikan, tradisi penduduk yang khas terhadap pemanfaatan ruang hidup (*cultural landscape*), infrastruktur dasar yang memadai.

Suryanti (2014 :120) dalam teorinya mengemukakan bahwa Yogyakarta mengelola kekayaan budayanya dengan perencanaan kombinasi dari politik, teknokrat, partisipatori, dan pendekatan *top down* serta *bottom up* untuk keberlanjutannya. Regenerasi di perkotaan dapat diartikan meningkatkan kualitas kehidupan untuk investasi masa depan, terfokus pada mengatasi masalah penting di perkotaan, meliputi SDA & ekonomi, partisipasi & kerjasama antar stake holder, meningkatkan kondisi fisik bangunan, struktur sosial, berbasis ekonomi & kondisi lingkungan (Alpopi, 2013 : 179). Pengelolaan revitalisasi berkelanjutan juga bisa dilakukan secara terpadu, walaupun kawasan-kawasan ini memiliki perbedaan fungsi, luasan, demografi dan lokasi. Dengan mengembangkan keunikan, strategi dengan pendekatan yang spesifik pada masing-masing lokasi (Arslan, 2015 : 289). Teori yang membahas tentang konservasi kawasan berkelanjutan dapat dilihat tabel 2.3.

Tabel 2.3. Teori tentang konservasi kawasan berkelanjutan

No.	Penulis/ Peneliti	Pokok Bahasan	Relevansinya dengan penelitian ini
1	Martokusumo, 2008 : 63-64	<p>Penurunan kinerja kawasan yang perlu direvitalisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur fisik.</li> <li>• Fungsi.</li> <li>• Aspek legal dan institusi kelembagaan.</li> <li>• Citra, yang berkaitan dengan persepsi publik.</li> <li>• Degradasi lingkungan.</li> <li>• Finansial atau ekonomi.</li> </ul> <p>Secara spesifik dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi lingkungan yang buruk.</li> <li>• Tingkat kepadatan bangunan dan manusia yang melebihi dukung lahan dan kemampuan infrastruktur.</li> <li>• Efektifitas pemanfaatan lahan rendah.</li> <li>• Lahan berpotensi untuk dikembangkan dengan percepatan pembangunan yang tinggi.</li> <li>• Lahan cukup luas, harga murah, pembebasan lahan memungkinkan.</li> <li>• Memiliki aset lingkungan yang menonjol dan memiliki infrastruktur dasar yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur fisik.</li> <li>• Fungsi.</li> <li>• Aspek legal dan institusi kelembagaan.</li> <li>• Citra.</li> <li>• Degradasi lingkungan.</li> <li>• Ekonomi.</li> </ul>
2	Solikhah, 2011 : 16	Revitalisasi kawasan yang berkelanjutan terdiri dari keseimbangan antara karakteristik fisik, pemanfaatan potensi ekonomi, dan kelestarian nilai sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik fisik,</li> <li>• Potensi ekonomi, dan</li> <li>• Nilai sosial</li> </ul>
3	Alpopi, 2013 : 179	Regenerasi di perkotaan dapat diartikan meningkatkan kualitas kehidupan untuk investasi masa depan, terfokus pada mengatasi masalah penting di perkotaan, meliputi SDA & ekonomi, partisipasi & kerjasama antar stakeholder, meningkatkan kondisi fisik bangunan, struktur sosial, berbasis ekonomi & kondisi lingkungan	<p>Meningkatkan kualitas kehidupan mengatasi masalah di perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDA &amp; ekonomi,</li> <li>• Kerjasama antar stakeholder,</li> <li>• Kondisi fisik bangunan, struktur sosial, berbasis ekonomi &amp; kondisi lingkungan</li> </ul>
4	Panggabean, 2014 : 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dan kawasan cagar budaya dapat memberi keuntungan kepada pemiliknya</li> <li>• Hanya dengan fungsi baru benda cagar budaya tersebut bisa dipertahankan.</li> <li>• Kegiatan pengembangan cagar budaya memperhatikan fungsional ekonomis dan faktor ekologis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KCB memberi keuntungan kepada pemiliknya</li> <li>• Dengan fungsi BCB bisa dipertahankan.</li> <li>• Pengembangan CB memperhatikan fungsional ekonomis dan ekologis.</li> </ul>
5	Suryanti, 2014 : 120	Yogyakarta memenej kekayaan budayanya dg perencanaan jangka panjang utk keberlanjutannya. Proses perancangan yg unik tersebut adalah berupa kombinasi dari politik, teknokrat, partisipatori, dan pendekatan top down serta bottom up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombinasi dari politik, teknokrat, partisipatori</li> <li>• Pendekatan top down serta bottom up</li> </ul>
6	Irani, 2014 : 647	Pembangunan berkelanjutan mengacu pada beberapa solusi desain arsitektur berkelanjutan untuk mengatasi masalah fisik, spasial, sosial, budaya dan ekonomi yang berdampak negatif bagi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain arsitektur berkelanjutan</li> <li>• Fisik, spasial, sosial, budaya dan ekonomi</li> </ul>
7	Setyaningsih, 2015 : 6-10	Konsep pengembangan revitalisasi kampung wisata berkelanjutan : sirkulasi, penghijauan, komponen penanda lanskap kawasan, arsitektur, pengembangan infrastruktur, konservasi air tanah dan manajemen persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sirkulasi,</li> <li>• penghijauan,</li> <li>• komponen penanda lanskap kawasan,</li> <li>• arsitektur,</li> <li>• pengembangan infrastruktur</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• konservasi air tanah</li> <li>• manajemen persampahan</li> </ul>
8	Arslan , 2015 : 289	Membangun pengelolaan revitalisasi berkelanjutan terpadu untuk KCB. Walaupun kawasan-kawasan ini memiliki perbedaan fungsi, luasan, demografi dan lokasi. Dengan mengembangkan keunikan, strategi dengan pendekatan yg spesifik pada masing-masing lokasi, dengan memperhatikan prinsip dasar dari manajemen rancangan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan revitalisasi berkelanjutan terpadu</li> <li>• Dengan pendekatan spesifik sesuai fungsi, luasan, demografi dan lokasi.</li> </ul>
9	United Cities and Local Governments, 2015 : 5	Penggunaan lahan dan perencanaan kota adalah tindakan budaya, di mana mereka mengakui, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya, sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk masa depan. Seniman, organisasi budaya dan lembaga budaya memainkan peran sentral dalam mengembangkan kota yang berkelanjutan. Pengurangan budaya ke nilai ekonominya dapat mengurangi atau menghilangkan kontribusinya untuk kebaikan bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan lahan dan perencanaan kota</li> <li>• Mengakui, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya</li> <li>• Aspirasi masyarakat</li> <li>• Seniman, organisasi budaya dan lembaga budaya</li> <li>• Nilai ekonomi untuk kebaikan bersama</li> </ul>
10	Gedik & Yildiz, 2016 : 195	Pendapat pengguna dapat berkontribusi pada dimensi fisik, sosial, ekonomi dan tata kelola strategi revitalisasi berkelanjutan. Data ini juga dapat mempengaruhi (1) penentuan tujuan dan target, (2) perencanaan dan desain dan (3) tahap pengelolaan proses revitalisasi berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisik, sosial, ekonomi dan tata kelola</li> <li>Mempengaruhi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan tujuan dan target,</li> <li>• Perencanaan dan desain</li> <li>• Pengelolaan</li> </ul> </li> </ul>
11	Tam, Fung & Sing, 2016	Bangunan bersejarah yang digunakan secara ekonomis terpelihara dengan baik. Untuk mendorong pariwisata dan penggunaan kembali proyek Lui Seng Chun, pemerintah mengundang organisasi nirlaba untuk mengoperasikan bangunan tersebut melalui penerapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan digunakan secara ekonomis</li> <li>• Revitalisasi bangunan melalui skema kemitraan</li> </ul>

Konservasi adalah proses pemeliharaan, perawatan, pemugaran serta pengelolaan sebuah tempat untuk mempertahankan signifikansi budayanya, agar makna kultural yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Konservasi KCB berkelanjutan dilakukan dengan bentuk revitalisasi berkelanjutan. Konservasi berkelanjutan adalah proses pemeliharaan, perawatan, pemugaran serta pengelolaan sebuah tempat untuk mempertahankan signifikansi budayanya yang merupakan simbol dan kenangan dari masa lalu, agar makna kultural yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Upaya yang dilakukan mencakup keseimbangan antara fisik lingkungan, spasial, pemanfaatan potensi ekonomi, kelestarian nilai sosial-budaya, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

Fisik lingkungan meliputi sirkulasi, penghijauan, komponen penanda lanskap kawasan, arsitektur, infrastruktur, konservasi air tanah, manajemen persampahan. Tanggapan pengguna mencakup persepsi, citra, pendapat. Sedangkan pemangku kepentingan terkait terdiri dari masyarakat lokal, mitra (masyarakat umum, perguruan tinggi, swasta, seniman, organisasi budaya dan lembaga budaya), dan pemerintah.

Revitalisasi berkelanjutan juga harus memperhatikan penurunan kinerja kawasan, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik bangunan dan kawasan. Degradasi kinerja kawasan mencakup fisik, fungsi, aspek legal dan institusi kelembagaan, citra, ekonomi.

### 3. Kawasan Cagar Budaya

#### a. Deskripsi Kawasan Cagar Budaya

Teori diskripsi KCB dibutuhkan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi KCB di Kauman. Budaya adalah seperangkat ciri spiritual, material, intelektual dan emosional yang khas dari masyarakat. Meliputi, seni, sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi dan keyakinan (UNESCO, 2001 dalam Gunlu 2008 : 3). Warisan mencakup bentang alam, tempat bersejarah, situs dan lingkungan binaan, serta keanekaragaman hayati, koleksi, praktik budaya masa lalu dan berkelanjutan, pengetahuan dan pengalaman hidup. (The Charter Etos, 1999 dalam Gunlu, 2008 : 4). Warisan budaya juga sering disebut sebagai sesuatu yang memiliki makna budaya. Warisan budaya bisa *tangible* atau *intangible*, dengan bentuk properti budaya berupa struktur atau artefak, objek, barang, artefak, struktur formasi, pertunjukan, tarian, lagu, musik yang berkaitan dengan sejarah, cara hidup masyarakat (Bakri, 2015 : 381-382). Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas (UURI No. 11 tahun 2010 pasal 1). Kawasan cagar budaya ditentukan dari potensi yang dimiliki, yang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

Teori-teori yang mengemukakan tentang signifikansi yang dimiliki KCB yakni penelitian Funo (2005 :135-136) yang membahas tentang Kampung Luar Batang Jakarta. Kampung tersebut memiliki arsitektur berkarakter lokal rumah tradisional betawi, merupakan kampung inti sejarah dari Jakarta, membutuhkan konservasi dengan program rehabilitasi. Penelitian lain yang mengemukakan teori tentang kampung CB adalah Lim (2017 : 85), yang menyatakan bahwa Kampung Glam singapore dengan orientasi Melayu terus menghalangi representasi warisan mereka sebagai bagian dari warisan kosmopolitan Singapura. Representasi saat ini tentang Kampong Glam sebagai "sedikit Melayu daripada Arab" adalah konsekuensi dari konseptualisasi tertentu dari bahasa Melayu. Inisiatif baru untuk meningkatkan karakter Melayu Kampong Glam paling baik dipahami dalam konteks pengabaian lama kontribusi Melayu yang ada untuk koneksi kosmopolitan.



Penelitian sejenis tentang KCB dilakukan oleh Ismail (2006 : 243), yang dalam pembahasannya mengemukakan tentang *spirit of place* dari Bussorah Street di Singapura, memiliki budaya khas berupa tradisi lokal dari bazaar makanan pada bulan Ramadhan di tepi Jalan Kandahar. Berupa penegasan identitas, reklamasi ruang dan kemungkinan untuk meningkatkan kelangsungan ekonomi Kampong Glam. Konsepsi budaya tempat (*spirit of place*) sangat penting untuk kualitas hidup penghuninya. Barang dan jasa budaya adalah pembawa makna dan identitas, pengurangan nilai ekonomi budaya dapat mengurangi atau menghilangkan kontribusinya untuk kebaikan bersama (*United Cities and Local Governments*, 2015 : 5). Adrisijanti, 2005 ( dalam Suryanti, 2014 : 121), mengemukakan tentang Kotagede Yogyakarta yang memiliki sejarah makam raja-raja, Masjid, rumah tradisional, kerajinan perak, gang-gang sempit, pasar tradisional, parit, tembok kota, alun-alun kota, lumbung, dan lain-lain. Panggabean (2014 : 25) mengemukakan tentang Kota lama Semarang yang memiliki keunikan sebagai "diorama" yang terpampang dalam museum sejarah kota lama. Di dalamnya terdapat rentetan peristiwa yang merefleksikan citra visual fisik kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu.

Teori tentang potensi KCB juga dikemukakan oleh Firmansyah (2015 : 503) mengemukakan signifikansi warisan budaya Singosari sebagai kawasan peninggalan kota kuno yang terletak di Kabupaten Malang dengan objek warisan seperti Candi Singosari, Candi Sumberawan, dan 2 Patung Dwarapala. Warisan budaya Singosari perlu dilestarikan karena memiliki sejarah dan nilai budaya sebagai bekal pengetahuan di masa depan tentang asal kerajaan Singosari. Azmi (2016 : 528 & 537) mengemukakan tentang Masjid Kapitan Keling yang menyoroti kekuatan identitas etnis dan keberlanjutan warisan Muslim India terutama untuk tujuan 'tatapan wisatawan'. Masjid Kapitan Keling sekarang menjadi simbol utama dalam peningkatan kekuatan sosial dan kehidupan masyarakat di Georgetown (Unsur-unsur budaya di Masjid Kapitan Keling dapat dilihat dari perspektif seni rupa, fotografi, arsitektur, pendidikan dan peninggalan sejarah).

Prompayuk (2016 : 239) dalam teorinya mengemukakan tentang pelestarian komunitas warisan budaya di Thailand. Bangunan warisan dan sekitarnya tersebut secara hati-hati dilestarikan, sementara cara hidup dan struktur sosio-ekonomi tidak. Untuk melestarikan warisan dengan sukses, metode preservasi harus memiliki pembentukan organisasi yang melakukan perubahan dan prosedur manajemen sistematis

untuk pemeliharaan. Demikian pula pemeliharaan signifikansi warisan budaya di Afrika, warisan budaya Afrika memiliki nilai-nilai tradisional seperti keluarga besar, menghormati orang tua, sistem pernikahan antar anggota dalam keluarga besar, pemujaan leluhur, agama tradisional (percaya pada keberadaan dewa), mencintai alam dan mencari keselarasan dengannya (Ajayi, 2017 : 13).

KCB yang lain diteliti oleh Mbakwe (2017 : 1), yang menyatakan bahwa pemeliharaan signifikansi warisan budaya masyarakat Mbaise, proses evolusi dan pertumbuhannya didasarkan pada sejumlah lembaga dan praktik yang memiliki implikasi sosiokultural, politik, ekonomi dan agama. Menghargai fakta bahwa pembangunan sosial adalah area yang luas dalam sejarah sosio-budaya, makalah ini berkonsentrasi pada struktur keluarga, lembaga perkawinan, keyakinan agama dan praktik. Nasser (2016 : 469) memilih kawasan konservasi berdasarkan konsep Spirit of place atau lokus jenius melalui kesatuan dan keragaman.

*United Cities and Local Governments* (2015 : 5) menyatakan bahwa Budaya terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, pengetahuan, seni dan kebijaksanaan, yang dengannya seseorang atau orang, secara individu atau kolektif, mengekspresikan baik kemanusiaan mereka dan makna yang mereka berikan untuk hidup mereka dan jalannya. Keragaman budaya adalah komponen penting yang merupakan sumber daya untuk pembangunan identitas orang dan masyarakat. Sebagai sesuatu yang hidup dan terus berkembang, ia harus diintegrasikan ke dalam kehidupan dan masyarakat dengan cara yang dinamis. Claudia (2016 : 693) telah menemukan metodologi baru untuk analisis dan manajemen risiko Pusat Warisan Kota dari beberapa ancaman perubahan iklim dan krisis sosio-ekonomi. Pengelolaan warisan budaya dengan promosi pendekatan bersama berdasarkan kerangka hukum yang efektif secara terpadu, yang melibatkan semua pemain dan pemangku kepentingan dan diintegrasikan ke dalam strategi perkotaan. Teori yang membahas tentang potensi warisan budaya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Teori tentang potensi warisan budaya

No. (1)	Penulis/ Peneliti (2)	Pokok Bahasan yang terkait dengan penelitian ini (3)	Relevansinya dengan penelitian ini (4)
1	Funo, Ferianto & Yamada,	Karakteristik arsitektur kampung Luar Batang : • berkarakter lokal rumah tradisional betawi • kampung inti sejarah dari Jakarta	• Rumah tradisional  • Inti sejarah

	2005 :135-136	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membutuhkan konservasi dg program rehabilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi</li> </ul>
2	Ismail, 2006 : 243	Spirit of place dari Bussorah Street, singapura, pengelolaan tradisi lokal dari bazaar makanan Ramadhan tetapi di Jalan Kandahar. Berupa penegasan identitas, reklamasi ruang dan kemungkinan untuk meningkatkan kelangsungan ekonomi Kampong Glam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas ruang</li> <li>• Reklamasi ruang</li> <li>• Peningkatan ekonomi</li> </ul>
3	UNESCO, 2001 dalam Gunlu 2008 : 3. The Charter Etos, 1999 dalam Gunlu, 2008 : 4	Budaya adalah seperangkat ciri spiritual, material, intelektual dan emosional yang khas dari masyarakat. Meliputi, seni, sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi dan keyakinan. Warisan mencakup bentang alam, tempat bersejarah, situs dan lingkungan binaan, serta keanekaragaman hayati, koleksi, praktik budaya masa lalu dan berkelanjutan, pengetahuan dan pengalaman hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budaya adalah seperangkat ciri spiritual, material, intelektual dan emosional yang khas dari masyarakat</li> <li>• Tempat bersejarah, situs dan lingkungan binaan, praktik budaya masa lalu dan berkelanjutan, pengetahuan dan pengalaman hidup</li> </ul>
4	Chun & Bin, 2008 : 1	Sejak Perang Dunia II, pola perencanaan kota-kota mengalami perubahan dari rekonstruksi skala besar, pembaruan bertahap menjadi regenerasi yang dipimpin oleh sosial dan budaya. Melindungi sejarah & konteks budaya lokal dalam revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosial dan budaya,</li> <li>• Sejarah &amp; konteks budaya lokal</li> </ul>
5	PerMenPU No.18/PRT/M/2010 pasal 1	Warisan budaya adalah warisan budaya terbangun di perkotaan maupun perdesaan yang perlu dipertahankan keutuhan kawasan inti dan keaktifan dalam pelestarian bangunan kuno/bersejarah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• warisan budaya terbangun</li> <li>• kawasan inti keaktifan</li> </ul>
6	UU No. 11 tahun 2010	Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan buatan manusia atau alam</li> <li>• Meruang, berinding dan/atau tidak dan beratap</li> </ul>
7	Panggabean (2014 : 25)	Mengemukakan tentang Kota lama Semarang yang memiliki keunikan sebagai "diorama" yang terpampang dalam museum sejarah kota lama. Di dalamnya terdapat rentetan peristiwa yang merefleksikan citra visual fisik kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diorama rentetan peristiwa kemegahan arsitektur di masa lalu</li> </ul>
8	Bakri, 2015 : 381-382	Ada tiga front dalam konservasi cagar budaya. Studi masa lalu cenderung fokus pada bidang ekonomi, sosial atau fisik secara mandiri, dimana sangat sedikit yang telah meneliti implikasi terintegrasi secara holistik. Telah mendefinisikan warisan budaya sebagai "nyata atau tidak berwujud bentuk properti budaya objek, barang, artefak, cara hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi, sosial atau fisik</li> <li>• Nyata atau tidak berwujud</li> <li>• Objek,</li> <li>• Artefak,</li> <li>• Cara hidup kontemporer</li> </ul>
9	<i>United Cities and Local Governments</i> , 2015 : 5	Budaya terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, pengetahuan, seni dan kebijaksanaan, yang dengannya seseorang mengekspresikan diri. Keragaman budaya merupakan sumber daya untuk pembangunan identitas orang dan masyarakat. Konsepsi budaya tempat ( <i>spirit of place</i> ) sangat penting untuk kualitas hidup penghuninya. Barang dan jasa budaya adalah pembawa makna dan identitas, pengurangan nilai ekonomi budaya dapat mengurangi atau menghilangkan kontribusinya untuk kebaikan bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai-nilai,</li> <li>• Kepercayaan,</li> <li>• Bahasa,</li> <li>• Pengetahuan,</li> <li>• Seni</li> <li>• Kebijaksanaan</li> <li>• <i>Spirit of place</i></li> <li>• Makna dan identitas</li> <li>• Nilai ekonomi budaya</li> </ul>
10	Claudia, 2016 : 693	Menyiapkan metodologi baru untuk analisis dan manajemen risiko Pusat Warisan Kota dari beberapa ancaman termasuk perubahan iklim dan krisis sosio-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan iklim</li> <li>• Krisis sosio-ekonomi</li> <li>• Pelestarian Nilai Warisan</li> </ul>

		ekonomi. Pengelolaan warisan budaya dengan promosi pendekatan bersama berdasarkan kerangka hukum yang efektif secara terpadu, yang melibatkan semua pemain dan pemangku kepentingan dan diintegrasikan ke dalam strategi perkotaan	Budaya secara terpadu & terintegrasi
11	Azmi, 2016 : 537	Masjid Kapitan Keling menyoroti kekuatan identitas etnis dan keberlanjutan warisan Muslim India terutama untuk tujuan 'tatapan wisatawan'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya masyarakat Muslim India telah menjadi produk 'tatapan wisatawan' yang menjadi simbol utama dan pusat fokus dalam peningkatan kekuatan sosial dan kehidupan masyarakat di Georgetown	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan identitas etnis dan keberlanjutan</li> <li>• Produk 'tatapan wisatawan'</li> <li>• Menjadi simbol utama</li> </ul>
12	Prompayuk, 2016 : 239	Unsur-unsur budaya di Masjid Kapitan Keling dapat dilihat dari perspektif seni rupa, fotografi, arsitektur, pendidikan dan peninggalan sejarah. Untuk melestarikan warisan budaya dengan sukses, metode preservasi harus memiliki pembentukan organisasi yang melakukan perubahan dan prosedur manajemen sistematis untuk pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur budaya arsitektur dan peninggalan sejarah</li> <li>• Organisasi manajemen sistematis.</li> </ul>
13	Firmansyah, 2016 : 503.	Singosari adalah kawasan peninggalan kota yang terletak di Kabupaten Malang dengan objek warisan Candi dan Patung. GMPS perlu melakukan upaya promosi, sosialisasi, dan kegiatan inovatif melibatkan masyarakat untuk menjaga warisan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya pelestarian dengan promosi, sosialisasi,</li> <li>• Kegiatan yang melibatkan masyarakat</li> </ul>
14	Ajayi, 2017 : 13	Nilai-nilai tradisional Afrika termasuk antara lain: keluarga besar, sistem keluarga besar, menghormati orang tua, pemujaan leluhur, agama tradisional, mencintai dan mencari keselarasan dengan alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga besar</li> <li>• Pernikahan antar keluarga</li> <li>• Menghormati orang tua,</li> <li>• Pemujaan leluhur</li> </ul>
15	Mbakwe, 2017 : 1	Proses evolusi dan pertumbuhan masyarakat Mbaise didasarkan pada kegiatan yang memiliki implikasi sosiokultural, politik, ekonomi dan agama. Sejarah sosio-budaya Mbaise berkonsentrasi pada struktur keluarga, lembaga perkawinan, keyakinan agama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosio-budaya,</li> <li>• Struktur keluarga,</li> <li>• Lembaga perkawinan,</li> <li>• Keyakinan agama</li> </ul>

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis tempat bersejarah yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang memperlihatkan ciri tata ruang khas, mencakup bentang alam, tempat bersejarah, situs dan lingkungan binaan, praktik budaya masa lalu dan berkelanjutan, pengetahuan dan pengalaman hidup. Bentuk potensi warisan budaya *tangible* yakni warisan budaya terbangun, yang berkarakter lokal rumah tradisional, kampung inti sejarah, identitas ruang, artefak, kekuatan identitas etnis, *spirit of place*, arsitektur. Bentuk potensi warisan budaya *intangible* meliputi keyakinan agama, sosial, budaya, ekonomi, cara hidup, pendidikan, keluarga besar dan pernikahan antar keluarga atau struktur keluarga.

#### **b. Kriteria Konservasi Kawasan Cagar Budaya**

Kriteria konservasi KCB mengkaji tentang kriteria yang menjadi dasar penilaian sebuah kawasan kuno layak untuk dilestarikan dan selanjutnya agar dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.



Dalam UURI No. 11 tahun 2010 pasal 1 dikemukakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam upaya pelaksanaan pelestarian, langkah pertama yang dilakukan adalah proses menetapkan nilai penting atau *significance* yang dimiliki bangunan dalam kawasan tersebut (Handoko, 2012 : 3-4). Tujuan dari penilaian makna kultural ini ialah untuk menentukan arah serta strategi pelestarian yang sesuai dengan kondisi kawasan yang akan dilestarikan. Penentuan tingkatan *heritage* benda cagar budaya berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- 1) Ilmu pengetahuan, yakni potensinya untuk diteliti lebih lanjut.
- 2) Substantif, yakni informasi untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa atau proses yang terjadi di masa lampau.
- 3) Antropologis, yakni informasi untuk menjelaskan perubahan budaya dalam bentang waktu yang lama dan proses adaptasi manusia terhadap lingkungan tertentu.
- 4) Ilmu sosial, yakni informasi untuk menjelaskan tindakan manusia dan interaksi manusia dengan manusia lainnya.
- 5) Arsitektural, yakni informasi yang menunjukkan gaya seni bangun masa tertentu, inovasi dalam penggunaan bahan dan ketrampilan merancang, dan merupakan hasil penerapan teknologi dan materi baru pada masa ketika dibangun.
- 6) Metodologis teoretis, yakni informasi yang dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan pengembangan metoda, teknik dan teori dalam berbagai bidang ilmu.
- 7) Sejarah, yakni informasi tentang kehidupan atau peristiwa tertentu yang bersejarah, tahap perkembangan bidang tertentu.
- 8) Etnik, yakni informasi yang dapat memberikan pemahaman latarbelakang kehidupan sosial, keagamaan, dan mitologi yang merupakan jatidiri suatu bangsa.
- 9) Publik, yakni informasi yang dapat dipakai untuk pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya, potensi sebagai fasilitas rekreasi dan potensi untuk menambah penghasilan masyarakat lewat kepariwisataan.
- 10) Estetis, yakni kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni bangun maupun bentuk-bentuk kesenian lain.

- 11) Kelangkaan, yakni tingkat keterbatasan ketersediaan sumberdaya arkeologi (atau budaya pada umumnya) yang serupa.
- 12) Hukum dan nilai penting yang dirumuskan menurut perundang-undangan tertentu.
- 13) Pendanaan, yakni perbandingan antara kemanfaatan yang dapat diperoleh dengan biaya yang akan dicurahkan untuk menangani sumberdaya arkeologi.

Adapun makna kultural yang terkandung dalam benda cagar budaya membantu untuk mengestimasi nilai signifikansi suatu tempat layak dilestarikan. Diharapkan, dengan memahami masa lalu dan memperdalam masa kini, akan sangat bermanfaat bagi generasi di masa mendatang (Antariksa, 2012 : 1; Handoko, 2012 : 3). Nasser (2016 : 469) memilih kawasan konservasi berdasarkan konsep *the spirit of place* atau lokus jenius melalui kesatuan dan keragaman.

Melengkapi teori tersebut, *Guidelines to the Burra Charter* 1988 (dalam Antariksa, 2012 : 2) menjelaskan kriteria nilai-nilai makna kultural secara umum yakni sebagai berikut.

- 1) Nilai estetika, mencakup aspek persepsi sensorik yang ditetapkan, mencakup skala, bentuk, tekstur, warna, dan material, bau dan suara yang terkait dengan tempat penggunaannya.
- 2) Nilai historis (*historic value*), meliputi sejarah dari estetika, ilmu pengetahuan dan sosial.
- 3) Nilai ilmiah, tergantung pada pentingnya subyek terdata, kelangkaan, kualitas keterwakilan.
- 4) Nilai sosial, mencakup kualitas spiritual, budaya politik, untuk mayoritas atau kelompok minoritas.
- 5) Pendekatan-pendekatan lainnya, kategori yang lebih tepat dapat dikembangkan seiring dengan meningkatnya pemahaman akan tempat tertentu.

Teori yang menyatakan tentang kriteria segi fisik perlunya bangunan atau kawasan kuno untuk dilestarikan, dikemukakan oleh Kasdi (2013 : 9), Sidharta & Budihardjo (1989 : 13), Doby, (1978 : 33-34), Kalman, (1980 : 13-23), dan UU No. 11 tahun 2010) yakni sebagai berikut.

- 1) Umur, usia kawasan atau bangunan CB minimal 50 tahun.
- 2) Estetika, dikaitkan dengan nilai estetis dan arsitektonis yang tinggi dalam bentuk, struktur, tata ruang dan ornamen.

- 3) Nilai kesejarahan, merupakan bagian dari masyarakat atau peristiwa tertentu dalam skala nasional, wilayah, dan daerah.
- 4) Keaslian, keberadaan bangunan atau kawasan CB yang masih asli, baik lengkap maupun tidak lengkap.
- 5) Kelangkaan, berkenaan dengan bangunan, tatanan tapak atau tatanan lingkungan yang jarang ditemukan.
- 6) Memperkuat kawasan di dekatnya.
- 7) Keistimewaan, kekhususan bangunan atau kawasan CB tersebut.
- 8) Penggunaan (usability), kesesuaian penggunaan dengan tata guna lahan, dapat dikembangkan untuk penggunaan lain tanpa mengganggu elemen arsitekturalnya.
- 9) Integritas, penempatan site masih asli, perubahan relatif sedikit, benda CB dalam keadaan baik.

Dari segi non fisik kriteria yang menentukan obyek perlu dilestarikan yakni sebagai berikut.

- 1) Kriteria nilai sosial, berdasarkan tinjauan bahwa kawasan bermakna bagi masyarakat.
- 2) Kriteria nilai komersial, berdasarkan peluangnya dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomis.
- 3) Kriteria nilai ilmiah, berdasarkan peranannya untuk pendidikan dan pengembangan ilmu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria bangunan atau kawasan kuno perlu untuk dilestarikan, yakni :

- 1) Umur, yakni berumur minimal 50 tahun.
- 2) Estetika, yakni mencakup skala, bentuk, tekstur, warna, dan material bernilai estetis dan arsitektonis yang tinggi.
- 3) Nilai kesejarahan, merupakan bagian dari masyarakat atau peristiwa tertentu.
- 4) Keaslian, yakni masih asli dan lengkap maupun tidak lengkap.
- 5) Kelangkaan, yakni bertatanan lingkungan yang jarang ditemukan.
- 6) Memperkuat kawasan di dekatnya.
- 7) Keistimewaan, yakni kekhususan bangunan atau kawasan CB tersebut.
- 8) Penggunaan (usability), kesesuaian dengan tata guna lahan dan dapat dikembangkan untuk penggunaan lain.
- 9) Integritas, yakni penempatan site masih asli.
- 10) *The spirit of place*, melalui kesatuan dan keragaman.

Kriteria non fisik nilai-nilai makna kultural yang menentukan kawasan kuno perlu dilestarikan yakni sebagai berikut.

- 1) Nilai historis, meliputi sejarah dari estetika, ilmu pengetahuan dan sosial.
- 2) Nilai ilmiah, meliputi kelangkaan, kualitas keterwakilan.
- 3) Nilai sosial, mencakup kualitas spiritual, budaya politik.

### c. Strategi Konservasi Kawasan Cagar Budaya

Kajian strategi dan model revitalisasi kawasan cagar budaya dilakukan untuk mengetahui berbagai strategi dan model yang diterapkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dari kajian tersebut diharapkan dapat ditemukan teori baru yang merupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya.

Untuk melaksanakan revitalisasi pada sebuah kawasan, dibutuhkan strategi yang tepat agar mendapatkan hasil yang optimal. Pengambilan keputusan dalam kegiatan membangun ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat (Hakim, 2007 : 1). Selanjutnya Hakim (2007 : 164-165) menyatakan bahwa revitalisasi kawasan budaya terdiri dari tiga prosedur sebagai berikut.

- 1) Kerangka hukum pembentuk lingkungan perkotaan (tata zonasi, peraturan sub-divisi, dan kode bangunan) yang berasal dari nilai-nilai sosial-budaya-keyakinan didukung oleh elaborasi maksud dari setiap aturan.
- 2) Penggunaan bahasa desain sebagai komunikasi dan pengambilan keputusan, yang menjadi solusi dalam menjaga dan melestarikan desain konfigurasi dan bentuk.
- 3) Organisasi fisik bangunan yang mampu mengakomodasi beragam kegunaan.

Laretna (2003 dalam Mansur, 2006 : 102), membagi kegiatan revitalisasi atas tiga bagian pokok sebagai berikut.

1. Konsep, adalah menghidupkan kembali suatu tempat yang memiliki aset potensial berupa pusaka alam dan budaya atau saujana budaya (*cultural landscape*), sebagai salah satu upaya pelestarian.
2. Tujuan, mewujudkan kembali vitalitas kawasan baik dalam kegiatan sosial-budaya, ekonomi maupun infrastruktur, dukungan utilitas, pemugaran ataupun pengembangan lainnya, hingga tercapai tujuan pelestariannya.
3. Obyek, bentuk kegiatan, dan pihak-pihak terkait.

Namun ada beberapa aspek yang diprioritaskan dalam revitalisasi yaitu vitalisasi pusaka budaya dan kehidupan masyarakatnya yang ada, serta nilai ekonomi masyarakat



dan lingkungan sehingga mampu memberi lebih banyak lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan Chung (2009 : 154) yang menyatakan bahwa aspek revitalisasi terdiri dari empat bagian yakni : 1) definisi dan identifikasi; 2) alasan-alasan dan tujuan; 3) untuk siapa warisan dipertahankan dan; 4) strategi yang tepat untuk pemeliharaan, interpretasi dan manajemen yang efektif.

Teori Wallace (2010 : 268) menyatakan bahwa proses revitalisasi terdiri dari lima tahap yakni: 1) kondisi awal stabil; 2) periode stres individu; 3) periode distorsi budaya; 4) periode revitalisasi (terjadi fungsi reformulasi, komunikasi, organisasi, adaptasi, transformasi budaya, dan rutinisasi); 5) kondisi baru stabil. Sedangkan Alimuddin (2011 : 2-3), mempunyai strategi pelaksanaan revitalisasi kawasan sebagai berikut.

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dengan menggerakkan investasi melalui pemberian stimulan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana, utilitas serta aksesibilitas kawasan untuk mewujudkan integarsi kawasan dengan kota.
- 3) Memprioritaskan penataan dan revitalisasi kawasan yang signifikan terhadap sejarah, kultural dan ilmu pengetahuan yang dianggap layak dikembangkan secara teknis, ekonomis, lingkungan dan kelembagaan.
- 4) Menyusun agenda yang lebih partisipatif terhadap aspirasi dan permasalahan komunitas lokal.
- 5) Menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan yang lebih luas termasuk mendorong inisiatif swasta untuk melakukan investasi pada kawasan.
- 6) Mendorong tumbuhnya komitmen untuk melakukan preservasi, restorasi, rehabilitas dan adaptasi terhadap kawasan kota lama termasuk pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan.
- 7) Mendorong dan memberdayakan institusi pemerintah kabupaten atau kota dan masyarakat agar lebih mampu merencanakan dan mengelola kawasan.
- 8) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengoptimalkan implementasi revitalisasi dilapangan.
- 9) Mendokumentasikan dan mendesiminasikan pengalaman penanganan revitalisasi (*good and bad practices*).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penanganan masalah revitalisasi kawasan menurut Wijayanti (2010 : 36), yaitu perbaikan lingkungan fisik kawasan, regulasi, pendanaan revitalisasi, pengembangan kegiatan khas kawasan, sosialisasi,

penentuan pelaksana revitalisasi, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pendampingan dan masterplan. Penyusunan panduan (*guideline*) mengenai bangunan *heritage* sangat diperlukan bagi upaya konservasi dan preservasi bangunan bersejarah. Melengkapi teori tersebut Suparwoko, 2014 : 86), mengemukakan tentang kriteria penyusunan panduan (*guideline*) bangunan *heritage* sebagai berikut.

- 1) Pedoman partisipasi masyarakat dalam pembuatan *guideline*
- 2) Memuat cara perawatan bangunan yang murah dan mudah bagi orang awam
- 3) Memuat prosedur pembinaan dan pendampingan mengenai perawatan bangunan *heritage*
- 4) Memuat mekanisme insentif perawatan bangunan *heritage*

Teori tentang unsur-unsur umum dari sistem manajemen yang efektif dari rencana strategis situs bersejarah di perkotaan sebagai berikut (2015 : 291).

- 1) Pemahaman bersama secara menyeluruh oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan umpan balik.
- 3) Pemantauan dan penilaian dampak tren, perubahan, dan intervensi dari yang diusulkan.
- 4) Keterlibatan mitra dan pemangku kepentingan.
- 5) Alokasi sumber daya yang diperlukan.
- 6) Kapasitas.
- 7) Akuntabilitas dari sistem manajemen yang dideskripsikan secara transparan.

Teori Henderson (2000 :527-528), mengemukakan tentang strategi penanganan konservasi yang dilakukan di Singapura yaitu dengan : 1) mempertahankan dan memulihkan bangunan bersejarah yg signifikan; 2) meningkatkan fisik lingkungan dan mengenalkan fitur baru yg sesuai untuk lebih meningkatkan identitas area tersebut; 3) mempertahankan, meningkatkan aktivitas berbasis etnik serta mengkonsolidasikan dengan aktivitas baru yg cocok; 4) melibatkan sektor publik & swasta utk melakukan konservasi. Penanganan konservasi di Singapura merupakan keseimbangan antara pembangunan kembali dengan konservasi (Blackburn, 2015 :362). Strategi konservasi untuk Robben Island, Singapura (Deacon, 2004 : 6) melindungi semua jenis signifikansi yang diidentifikasi; 2) menentukan jenis bangunan situs dan makna yang terkait; 3) mencapai keseimbangan dan menetapkan prioritas. Pelestarian bangunan warisan di Singapura dievaluasi berdasarkan biaya dan manfaat ekonomi serta mempertahankan

nilai-nilai inheren dari warisan yang dibangun untuk memberi masyarakat identitas, rasa tempat dan keterkaitannya dengan kenangan bersama (Watanamongkhon, 2014 : 148).

Pelestarian bangunan bersejarah bisa dilakukan dengan rehabilitasi, yakni penggunaan baru yang berbeda dari yang asli tanpa merubah karakter bangunan (philokyprou, 2014 : 758). Sedangkan strategi konservasi Luang Prabang, Laos (Aas, 2005 : 38-42): membangun jaringan komunikasi, membangkitkan pendapatan untuk konservasi, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata, memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Langkah-langkah strategi konservasi (Balmergy, 2016 : 171) : menjadi bagian dari kebijakan koheren ekonomi, sosial pengembangan dan perencanaan kota dan daerah; menjamin keharmonisan hubungan antara daerah perkotaan yang bersejarah dan kota secara keseluruhan; Konservasi sosial diikuti; keseluruhan pengembangan (lapangan pekerjaan, layanan, fasilitas, pemeliharaan & mempercantik tampilan fisik ); harus diberdayakan oleh penduduk daerah bersejarah; perbaikan perumahan harus menjadi salah satu dasar tujuan konservasi; tujuan konservasi harus jelas menyatakan kepada semua pihak yang terlibat serta hukum, administratif dan keuangan. Pengaruh konservasi secara regional/lanskap (Moilanen 2014: 194-195) : kualitas lingkungan, program konservasi sangat sensitif terhadap pengurangan dana. Ada beberapa konversi dalam fungsi dan kepemilikan, transformasi gaya dan struktur arsitektur serta menghubungkan konservasi dengan industri pariwisata (Winarso, 2010 : 26). Konservasi Pecinan Pasuruan (Antariksa, 2012 : 1): elemen kawasan, sejarah, sosio-budaya, pertimbangan hukum, arsitektur vernakular (façade dan ornamen bangunan).

Konservasi warisan yang dibangun perlu dilakukan untuk mengetahui identitas fisik dan simbolis serta bagaimana bangunan bisa bertahan untuk generasi masa depan tapi juga bagaimana terhubung dengan masa lalu (Lukito, 2017 : 8). Horayangkura (2005:82) mempromosikan konservasi warisan budaya Asia melalui : konsep, pendekatan, dan teknik konservasi diintegrasikan dengan sistem pendidikan dasar; pembangunan berbasis masyarakat, mendorong keterlibatan sektor swasta dan publik-swasta kemitraan, penggunaan kembali adaptif, melestarikan isi arsitektur dan sejarah serta menetapkan standar patokan. Barichievy (2017) menyatakan bahwa konservasi di Kerajaan Arab Saudi melalui proklamasi dan reintroduksi yang strategis.

Teori yang membahas tentang strategi revitalisasi secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Strategi revitalisasi kawasan

No. (1)	Penulis/ Peneliti (2)	Pokok Bahasan yang terkait dengan penelitian ini (3)	Relevansinya dengan penelitian ini (4)
1	Hakim (2007 : 164-165)	Revitalisasi kawasan budaya terdiri dari tiga prosedur sebagai berikut : 1. Kerangka hukum pembentuk lingkungan perkotaan. 2. Penggunaan bahasa desain sebagai komunikasi dan pengambilan keputusan. 3. Organisasi fisik bangunan yang mampu mengakomodasi beragam kegunaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka hukum</li> <li>• Bahasa desain</li> <li>• Organisasi fisik bangunan</li> </ul>
2	Laretna (2003 dalam Mansur, 2006 : 102)	Kegiatan revitalisasi terdiri atas tiga bagian pokok : 1. Konsep, menghidupkan kembali aset potensial suatu tempat. 2. Tujuan, mewujudkan kembali vitalitas kawasan hingga tercapai tujuan pelestariannya. 4. Objek, bentuk kegiatan, dan pihak-pihak terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep</li> <li>• Tujuan</li> <li>• Objek</li> </ul>
3	Chung (2009 : 154)	Aspek revitalisasi terdiri dari : 1. Definisi dan identifikasi; 2. Alasan-alasan dan tujuan; 3. Untuk siapa warisan dipertahankan dan; 4. Strategi yang tepat untuk pemeliharaan, interpretasi dan manajemen yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi dan identifikasi;</li> <li>• Alasan-alasan dan tujuan;</li> <li>• Alasan warisan dipertahankan</li> <li>• Strategi, interpretasi &amp; manajemen</li> </ul>
4	Wallace, A., F., C., 2010 : 268	Proses revitalisasi terdiri dari lima tahap yakni: 1) kondisi awal stabil; 2) periode stres individu; 3) periode distorsi budaya; 4) periode revitalisasi (terjadi fungsi reformulasi, komunikasi, organisasi, adaptasi, transformasi budaya, dan rutinisasi); 5) kondisi baru stabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kondisi awal stabil;</li> <li>• periode stres individu;</li> <li>• periode distorsi budaya;</li> <li>• periode revitalisasi</li> <li>• kondisi baru stabil</li> </ul>
5	Alimuddin (2011 : 2-3),	Strategi pelaksanaan revitalisasi kawasan : 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dengan menggerakkan investasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana, utilitas serta aksesibilitas kawasan. 3. Memprioritaskan penataan dan revitalisasi kawasan yang signifikan, dikembangkan secara teknis, ekonomis, lingkungan dan kelembagaan. 4. Menyusun agenda yang lebih partisipatif terhadap aspirasi dan permasalahan komunitas lokal. 5. Menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan yang lebih luas. 6. Mendorong tumbuhnya komitmen untuk melakukan preservasi, restorasi, rehabilitas dan adaptasi terhadap kawasan kota lama. 7. Mendorong dan memberdayakan institusi pemerintah kabupaten atau kota dan masyarakat. 8. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. 9. Mendokumentasikan dan mendesiminasikan pengalaman penanganan revitalisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi.</li> <li>• Kualitas sarana prasarana, utilitas serta aksesibilitas.</li> <li>• Penataan dan revitalisasi.</li> <li>• Agenda yang lebih partisipatif.</li> <li>• Sumber-sumber pendanaan.</li> <li>• Tumbuhnya komitmen.</li> <li>• Memberdayakan institusi, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>• Sistem monitoring dan evaluasi.</li> <li>• Dokumentasi dan desiminasi program.</li> </ul>
6	Henderson,	Strategi penanganan konservasi yang dilakukan di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mempertahankan dan</li> </ul>



	2000 :527-528	Singapura yaitu dengan : 1) mempertahankan dan memulihkan bangunan bersejarah yg signifikan; 2) meningkatkan fisik lingkungan dan mengenalkan fitur baru yg sesuai untuk lebih meningkatkan identitas area tersebut; 3) mempertahankan, meningkatkan aktivitas berbasis etnik serta mengkonsolidasikan dengan aktivitas baru yg cocok; 4) melibatkan sektor publik & swasta utk melakukan konservasi	memulihkan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan fisik lingkungan</li> <li>• mempertahankan, meningkatkan aktivitas berbasis etnik</li> <li>• melibatkan sektor publik &amp; swasta</li> </ul>
7	Deacon, 2004 : 6	Strategi konservasi untuk Robben Island, Singapura : 1) melindungi semua jenis signifikansi yang diidentifikasi; 2) menentukan jenis bangunan situs dan makna yang terkait; 3) mencapai keseimbangan dan menetapkan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melindungi signifikansi</li> <li>• bangunan situs dan makna terkait;</li> <li>• keseimbangan dan prioritas</li> </ul>
8	Aas, 2005 : 38-42	strategi konservasi Luang Prabang, Laos : membangun jaringan komunikasi, membangkitkan pendapatan untuk konservasi, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata, memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jaringan komunikasi,</li> <li>• pendapatan</li> <li>• melibatkan masyarakat lokal</li> <li>• kegiatan pariwisata,</li> <li>• kolaborasi antar pemangku kepentingan</li> </ul>
9	Balmergy, 2016 : 171	Strategi konservasi, meliputi : 1. Menjadi bagian dari kebijakan koheren ekonomi, sosial pengembangan dan perencanaan kota dan daerah; 2. Menjamin keharmonisan hubungan antara daerah perkotaan yang bersejarah dan kota secara keseluruhan; 3. Konservasi sosial diikuti keseluruhan pengembangan (lapangan pekerjaan, layanan, fasilitas, pemeliharaan & mempercantik tampilan fisik ); 4. Diberdayakan oleh penduduk daerah bersejarah; 5. Perbaikan perumahan harus menjadi salah satu dasar tujuan konservasi; 6. Tujuan konservasi harus jelas menyatakan kepada semua pihak yang terlibat serta hukum, administratif dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kebijakan perencanaan kota</li> <li>• hubungan dengan kota secara keseluruhan;</li> <li>• Konservasi sosial &amp; fisik</li> <li>• penduduk daerah bersejarah;</li> <li>• perbaikan perumahan</li> <li>• dinyatakan kepada semua pihak terkait</li> </ul>

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa strategi revitalisasi kawasan meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

1) Kondisi awal (stabil).

- a) Definisi, identifikasi potensi fisik dan non-fisik.
- b) Sosialisasi, sangat penting untuk membangun pemahaman yang sama antar *stakeholders* (masyarakat lokal, institusi, Pemkot, swasta, partisipan).
- c) Jadwal waktu aktivitas, monitoring, evaluasi, masukan balik, perencanaan sumber pendanaan dan alokasinya.
- d) Pendirian lembaga manajemen wilayah dan jaringan komunikasi antar *stakeholders*.

2) Pengembangan konsep dari area yang direvitalisasi.

- a. Melindungi signifikansi

- b) Menentukan alasan, tujuan, strategi pemeliharaan, interpretasi, dan monev.
  - c) Mempertahankan dan meningkatkan aktivitas berbasis etnik
  - d) Memprioritaskan sejarah, budaya dan aspek ilmu pengetahuan.
  - e) Mampu mengakomodasi beragam kegunaan.
  - f) Meningkatkan kualitas lingkungan.
  - g) Menyelaraskan program dengan perencanaan kota dan daerah secara keseluruhan
  - h) Membentuk kerangka hukum.
- 2) Periode revitalisasi.
- a) Reformulasi fungsi, komunikasi, organisasi, adaptasi, transformasi budaya, kegiatan rutin yang ada.
  - b) Meningkatkan mutu pelayanan, infrastruktur, utilitas, dan aksesibilitas kawasan.
  - c) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan investasi
  - d) Memunculkan sumber pendanaan yang luas, termasuk sektor swasta.
  - e) Membimbing dan melatih, dalam bidang perawatan bangunan.
  - f) Mengarsipkan dan mengenalkan pengalaman penanganan revitalisasi.
- 3) Kondisi stabil yang baru.
- 1) Mengembangkan monitoring sistem evaluasi
  - 2) Melibatkan dengan kegiatan wisata

#### **d. Model Pengelolaan Konservasi Kawasan Cagar Budaya**

Kajian model pengelolaan konservasi kawasan cagar budaya dilakukan untuk mengetahui berbagai model yang diterapkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dari kajian tersebut diharapkan dapat ditemukan teori baru yang merupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya.

Nur dan Herwandi (2009 : 1, 4 dan 6) melakukan model pengelolaan terpadu (antara masyarakat dan Pemerintah Kota) untuk merevitalisasi warisan sejarah di Sumatera Barat, yang telah rusak secara struktural dan hilang nilai keorisinalan warisan sejarahnya. Model ini berbentuk pembenahan dan pembinaan terhadap segala potensi guna meningkatkan daya tarik daerah dalam dunia kepariwisataan. Kegiatan revitalisasi dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh dengan sistem kota, terberdayakan pertumbuhan ruang ekonominya, meningkatkan prasarana, sarana dan kenyamanan lingkungan, terjaminnya kelestarian dan kemampuan daya dukung sumberdaya alam, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Alimuddin (2011 : 6) menerapkan teori yang berbeda yaitu dengan mengembangkan model pembagian zone atau segmen kawasan menjadi segmen atau sub kawasan yang saling mendukung satu dengan yang lain untuk penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan Kota Watansoppeng Kabupaten Soppeng, Makassar. Segmen gerbang pada jalan masuk eksisting diarahkan untuk pengembangan perparkiran, kawasan olahraga dan penataan pedagang kaki lima secara linear menuju ke arah segmen utama pada bagian dalam kawasan. Selanjutnya memadukan rencana segmen potensial yang ada di sekitar site.

Teori Arslan (2015 : 292) mengemukakan bahwa pengelolaan situs kawasan bersejarah yang dilakukan di Distrik Bazaar dan Khans di Turki meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

1) Saat Kondisi Identifikasi.

Pada tahap ini perlindungan, rehabilitasi fungsional dan manajemen penanganan situs harus didefinisikan, termasuk penyediaan kolaborasi semua pemangku kepentingan yang terkait.

2) Analisis Site.

Pada tahap ini definisi nilai universal dari area yang ditangani harus diberikan. Masalah-masalah yang ada diidentifikasi dan kemudian dianalisis kondisi fungsional dan manajerialnya.

3) Definisi visi daerah dan pengaturan kebijakan.

Pada tahap ini pengembangan dari visi masa depan daerah diharapkan. Visi ini harus mencakup strategi tentang perlindungan dan konservasi distrik; promosi daerah di tingkat nasional dan arena internasional; administrasi, manajerial dan model keuangan.

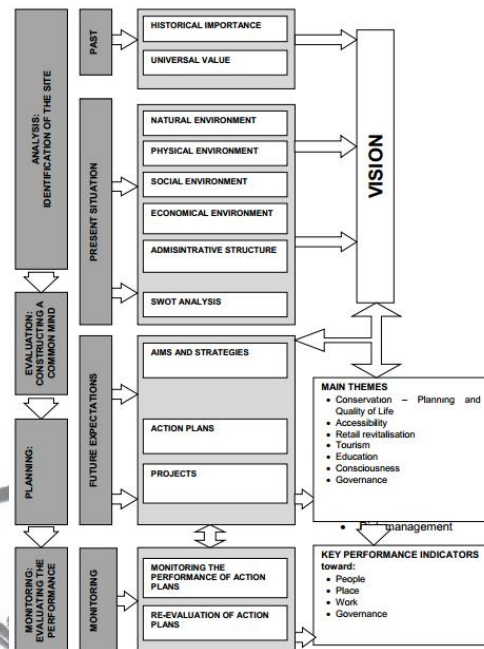
4) Penentuan Program Kerja, Jadwal dan Rencana Aksi.

Dalam tahap ini tindakan dari para pemangku kepentingan terkait, jadwal untuk rencana aksi, sumber keuangan dan anggaran kegiatan harus direncanakan.

5) Monitoring, Evaluasi dan Pelatihan.

Dalam tahap ini dilakukan rencana pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan pelatihan pada *stakeholder* terkait.

Skema dari uraian di atas dapat dilihat gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model pengelolaan Distrik Bazaar dan Khans  
Sumber : Arslan, 2015 : 302

Berbeda dengan teori di atas, Gur (2015 : 239) melakukan pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan kawasan *heritage* di Distrik Fener-Balat Istanbul. Tidak hanya mempertimbangkan aspek kualitas fasad dan fisik saja, tetapi juga berurusan dengan perubahan aspek-aspek sosial-ekonomi melalui regenerasi, revitalisasi dan rehabilitasi berbentuk restorasi rumah, rehabilitasi sosial-ekonomi. Program ini bertujuan untuk : 1) regenerasi dan rehabilitasi sosial-ekonomi berkelanjutan dari distrik Fener-Balat, 2) membuat kegiatan ekonomi untuk anggota masyarakat, 3) memperkuat kapasitas teknis dari perkotaan, dan 4) membuat replika model rehabilitasi perkotaan yang sukses.

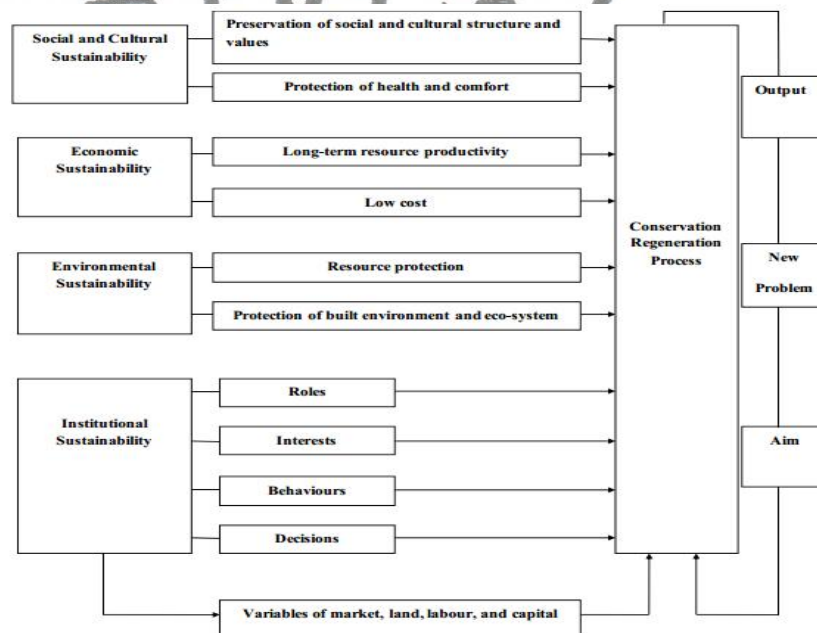
Konsep model pengelolaan kawasan bersejarah di Singapore, menurut Henderson (2012 : 72-73) sangat memperhatikan kualitas kehidupan, lingkungan yang baik, masyarakat yang inklusif dan rumah yang memiliki memungkinkan untuk perkembangan ekonomi. Singapore mempunyai karakter dan *sense of history* yang unik dengan memfungsikan kembali bangunan *heritage* untuk kegiatan ekonomi. Sedangkan Grasso (2014 : 175) mengemukakan bahwa pengelolaan Kota Sicilia di Taormina Italia, yakni mendorong inisiatif pengembangan pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan semua sumber daya berkualitas yang dapat ditemukan di wilayah kota secara bersama-sama untuk membangun *one-stop service* untuk wisatawan



dan mengintegrasikannya ke dalam rencana komunikasi berbasis Web untuk optimasi media sosial. Daya saing jangka panjang tergantung pada kapasitas lokal untuk beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu, perencanaan budaya memiliki konsep *clacicism* sebagai patokan, ditunjukkan oleh bentuk yang paling menarik dan inovatif.

Pengelolaan Daerah bersejarah di Baghdad Irak menurut Akkam (2012 : 52-53) yakni dengan regenerasi konservasi yang mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan partisipasi penuh dari semua pemangku kepentingan. Untuk mencapai keberhasilan upaya konservasi berkelanjutan, komponen-komponen yang ditangani yakni sebagai berikut.

- 1) Ekonomi, meliputi investor, perusahaan swasta, pelayanan sosial, pemerintah pusat, organisasi internasional, pemilik modal dalam negeri maupun swasta.
- 2) Sosial, meliputi jasa modal manusia seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- 3) Lingkungan, meliputi infrastruktur dan lingkungan binaan.
- 4) Struktur Kelembagaan masyarakat, meliputi aspek manajemen dan tata kelola masyarakat, kantor walikota, badan-badan pembangunan dan masyarakat setempat.



Gambar 2.2. Model pengelolaan daerah bersejarah di Baghdad Irak  
Sumber : Akkam, 2013 : 52

Tahap *action plan* regenerasi wilayah bersejarah di Baghdad sebagai berikut.

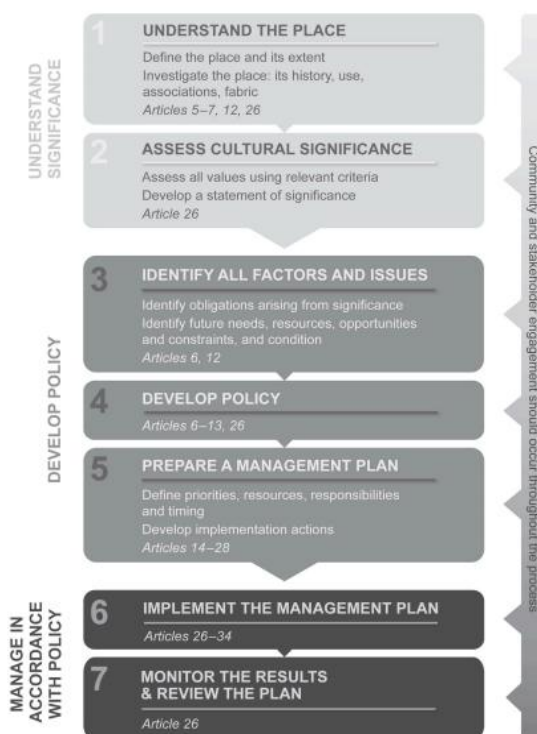
- 1) Segera menghentikan pembongkaran di daerah bersejarah mulai tahun 2003.
- 2) Mendirikan *independen Urban Heritage* Dewan Bersejarah yang dipimpin oleh perencana akademik dan arsitek dan termasuk aktor yang berbeda.

- 3) Menilai dan mengevaluasi kembali status daerah bersejarah yang ada, masyarakat, anggaran, modal, dan lingkungan fisik oleh para ahli.
- 4) Membangun strategi dan program untuk regenerasi konservasi yang berkelanjutan dan menetapkan jadwal waktu pelaksanaannya. Strategi ini harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan yang komprehensif.
- 5) Membangun jaringan kerjasama antara semua pemangku kepentingan nasional dan internasional.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.2.

The Burra Charter (2013 : 10), mengemukakan bahwa untuk mengelola sebuah tempat cagar budaya tahapan yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, meliputi mengenali tempat tersebut dan menilai signifikansi budaya yang ada di dalamnya.
- 2) Mengembangkan kebijakan, meliputi mengidentifikasi semua faktor dan isu, mengembangkan kebijakan dan mempersiapkan rencana pengelolaan.
- 3) Pengelolaan disesuaikan dengan kebijakan, meliputi penerapan rencana pengelolaan, memonitor hasil dan mereview perencanaan yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.3.



Skema 2.3. Langkah menejemen perencanaan tempat bersignifansi budaya  
Sumber : The Burra Charter, 2013 : 10

Teori yang membahas tentang model pengelolaan konservasi KCB secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Model pengelolaan KCB

No. (1)	Penulis/ Peneliti (2)	Pokok Bahasan yang terkait dengan penelitian ini (3)	Relevansinya dengan penelitian ini (4)
1	Arslan (2015 : 292)	Pengelolaan situs kawasan bersejarah : 1) Saat Kondisi Identifikasi; rehabilitasi fungsional dan manajemen penanganan situs harus didefinisikan. 2) Analisis Site; definisi nilai universal dari area yang ditangani harus diberikan. 3) Definisi visi daerah dan pengaturan kebijakan, pengembangan dari visi masa depan daerah. 4) Penentuan Program Kerja, Jadwal dan Rencana Aksi. 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi.</li> <li>• Analisis Site.</li> <li>• Visi daerah, pengaturan kebijakan.</li> <li>• Program kerja, Jadwal dan Rencana Aksi.</li> <li>• Monitoring, Evaluasi dan Pelatihan</li> </ul>
2	Gur (2015 : 239).	Pengelolaan kawasan <i>heritage</i> : 1) Regenerasi dan rehabilitasi sosial-ekonomi berkelanjutan 2) Membuat kegiatan ekonomi untuk anggota masyarakat 3) Memperkuat kapasitas teknis dari perkotaan, 4) Membuat replika model rehabilitasi perkotaan yang sukses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regenerasi dan rehabilitasi sosial-ekonomi</li> <li>• kegiatan ekonomi masyarakat</li> <li>• kapasitas teknis perkotaan,</li> <li>• model rehabilitasi perkotaan</li> </ul>
3	Grasso (2014 : 175)	Model pengelolaan konservasi dengan mendorong inisiatif pengembangan pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk membangun <i>one-stop service</i> untuk wisatawan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana komunikasi berbasis Web	pengembangan pariwisata berkelanjutan
4	Akkam (2012 : 52-53)	Pengelolaan Daerah bersejarah : 1) Ekonomi (investor, perusahaan swasta, pelayanan sosial, pemerintah pusat, organisasi internasional, pemilik modal dalam negeri maupun swasta). 2) Sosial (jasa modal manusia seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan). 3) Lingkungan (infrastruktur dan lingkungan binaan). 4) Struktur Kelembagaan masyarakat (aspek manajemen dan tata kelola masyarakat, kantor walikota, badan-badan pembangunan, yang mengatur dewan dan masyarakat setempat). Action plan : 1) Segera menghentikan pembongkaran. 2) Mendirikan <i>independen Urban Heritage</i> . 3) Menilai dan mengevaluasi kembali status daerah bersejarah yang ada. 4) Membangun strategi dan program untuk regenerasi konservasi yang berkelanjutan dan menetapkan jadwal waktu pelaksanaannya. 5) Membangun jaringan kerjasama antara semua pemangku kepentingan.	Pengelolaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi.</li> <li>• Sosial.</li> <li>• Lingkungan.</li> <li>• Struktur Kelembagaan masyarakat.</li> </ul> Action plan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghentikan pembongkaran.</li> <li>• Mendirikan <i>independen Urban Heritage</i>.</li> <li>• Menilai dan mengevaluasi status konservasi.</li> <li>• Membangun strategi konservasi berkelanjutan.</li> <li>• Membangun jaringan kerjasama.</li> </ul>
5	The Burra Charter (2013 : 10),	Mengelola sebuah tempat cagar budaya, tahapan yang perlu dilakukan : 1) Mengetahui makna yang terkandung di dalamnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.</li> <li>• Mengembangkan kebijakan.</li> </ul>

		(mengenali tempat dan menilai signifikansi budaya). 2) Mengembangkan kebijakan (mengidentifikasi faktor dan isu, mengembangkan kebijakan dan mempersiapkan rencana pengelolaan). 3) Pengelolaan disesuaikan dengan kebijakan (penerapan rencana pengelolaan, memonitor hasil dan mereview perencanaan yang telah dibuat).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan disesuaikan dengan kebijakan.</li> </ul>
6	Wijayanti, 2010: 36.	Yang masih belum optimal dari penanganan program revitalisasi Kauman adalah regulasi, pendanaan konservasi, master plan serta belum adanya evaluasi kegiatan.	Regulasi, pendanaan konservasi, master plan serta belum adanya evaluasi kegiatan.

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan konservasi KCB meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Identifikasi.
  - a) Mengenali tempat.
  - b) Menilai signifikansi budaya yang terkandung di dalamnya.
- 2) Analisa site.
  - a) Mendefinisikan nilai universal dari area yang ditangani.
  - b) Menilai dan mengevaluasi status konservasi.
- 3) Pengaturan kebijakan.
  - a) Pembentukan organisai pelestarian mandiri.
  - b) Mengembangkan visi regional.
  - c) Membangun jaringan kerasama antar *stakeholders*.
- 4) Menentukan program kerja, jadwal dan rencana tindakan.
  - a) Mendefinisikan status pelestarian, rehabilitasi fungsional, menejemen pemeliharaan dan bentuk kolaborasi antar *stakeholder* yang menanganinya.
  - b) Mengerjakan model menejemen terintegrasi (antara komunitas dengan Pemerintah Kota).
  - c) Mengembangkan skedul rencana kegiatan, sumber pembiayaan dan pendanaan.
- 5) Rencana kegiatan
  - a) Mengidentifikasi problem fisik dan perubahan aspek sosio-ekonomi-budaya
  - b) Menentukan segmen atau sub-region yang saling mendukung
  - c) Mengembangkan strategi, program and skedul untuk regenerasi, revitalisasi dan rehabilitasi sosial, ekonomi, budaya, keberlanjutan lingkungan
  - d) Menentukan rencana detail dengan program rehabilitasi jangka pendek untuk konservasi fisik
  - e) Pengelolaan limbah secara optimal



6) Monitoring, evaluasi dan pelatihan

- a) Membuat rencana monitoring dan manajemen implementasi kedepan.
- b) Pelatihan untuk *stakeholder* terkait

**f. Kawasan Cagar Budaya (KCB) Kauman Surakarta**

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Kauman yang bisa ditelaah antara lain tersebut dibawah ini.

Kauman Surakarta, menurut Sidharta dan Budihardjo (1989 : 36) “adalah lingkungan Islam dan juga daerah perdagangan batik tua yang perlu dikaji lebih mendalam”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Kauman merupakan kampung Islam dan batik kuno yang layak untuk dijadikan obyek penelitian selanjutnya. Metoda yang digunakan oleh Sidharta dan Budihardjo yaitu metoda penyandraan (*descriptive method*) dengan melakukan perekaman pada bangunan yang dinilai layak untuk dilestarikan, kemudian diungkap data-data pelengkapanya seperti tahun pembangunan, penggunaan , perubahan dan lain-lain. Pendapat Sidharta dan Budihardjo menjadi dasar awal untuk meneliti Kauman. Selanjutnya diketahui bahwa Kauman pada masa lalu adalah tempat tinggal *abdi dalem ulama* dan Pengusaha Batik. Artefak rumah Penghulu/*pengulu*, khotib/*ketib* dan rumah pengusaha batik masih dapat dijumpai sampai saat ini (Musyawaroh, 2009 : 54).

Teori Setyaningsih (2007 : 121), mengemukakan bahwa pada masa lalu Masjid Agung menjadi pusat orientasi spasial dan pusat kegiatan dari kampung Kauman. Nama wilayah spasial kampung diberikan berdasarkan aktivitas penghuninya, seperti kampung Pengulon merupakan tempat tinggal penghulu Masjid Agung, kampung Sememen sebagai tempat tinggal Ketib Sememi, kampung Modinan merupakan tempat tinggal para Modin. Selain itu terdapat kampung para *teteko* (pendatang) yaitu Kampung Baladan, Brodiran, Gerjen dan lain-lain. Jaringan jalan pembagi spasial terbentuk secara organik, dengan pola *grid iron*. Penamaan spasial kampung Kauman yang diteliti oleh Setyaningsih dijadikan masukan dalam penelitian ini. Setyaningsih menggunakan pendekatan diskriptif-analitik dengan proses induksi, metode survey yang digunakan menitik beratkan pada penggalian informasi terhadap *key person* secara mendalam.

Teori di atas didukung oleh pendapat Nurjayanti (2012 : 12), yang menyatakan bahwa pada rumah tinggal Kauman terdapat nilai-nilai ke-Islaman yang berfungsi untuk melindungi jiwa, harta, keturunan dan agama yang terwujud secara abstrak dan konkrit. Secara abstrak tercermin pada akhlaq atau perilaku penghuni, sedangkan secara konkrit

terwujud pada sistem zoning, hierarki ruang, kiblat sebagai orientasi kegiatan yang berdampak pada lay out furniture, perwujudan hijab fisik dan hijab perilaku, hiasan interior/benda pengingat Allah dan kebersihan ruang. Perilaku penghuni dan sistem spasial dalam ruang dari penelitian Nujayanti dapat diambil sebagai masukan dalam penelitian ini. Nurjayanti menggunakan metoda studi kasus (*single case study*) dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. digunakan pada penelitian ini untuk menggali nilai-nilai Ke-Islaman pada rumah tinggal, perwujudannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Musyawaroh (2008 : 132) dalam teorinya menyatakan bahwa untuk melestarikan Kauman strategi revitalisasi yang diterapkan sebagai berikut : Jangka pendek, menghidupkan kembali usaha batik; jangka menengah, menghidupkan kembali kampung santri; dan jangka panjang, menjadikan Kauman sebagai kampung wisata religius & batik. Langkah awal yang dilakukan untuk merevitalisasi kawasan Kauman adalah identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi yang dimiliki kawasan. Hasil pendampingan Musywaroh dan tim dijadikan masukan bagi penelitian ini. Metode yang digunakan oleh Musywaroh dkk. adalah *partisipatory action research*, dengan melibatkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan program. Upaya revitalisasi kawasan sudah mulai dilaksanakan, akan tetapi hasilnya belum optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Panuwun (2012 : 3) yang menyatakan bahwa kawasan bersejarah yang memiliki bangunan kuno berarsitektur joglo, limasan, dan Indis sangat potensial untuk dijadikan *heritage tourism area*. Pendapat Panuwun dijadikan pembanding dalam penelitian ini. Penelitian Panuwun menggunakan kasus tunggal dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji dan menjabarkan fenomena artefak (*bends seni/arsitektural*) serta persoalan sosial budaya masyarakat setempat yang melingkupinya.

Karsono (1996 : 53) menyatakan bahwa identifikasi spasial yang dimiliki permukiman Kauman, yaitu masyarakat Kauman yang tinggal di bagian dalam (penduduk asli) mempunyai perbedaan kehidupan sosial ekonomi yang cukup menyolok dengan masyarakat yang tinggal di tepi jalan besar (*teteko*). Masyarakat yang tinggal di bagian dalam bermata pencaharian sebagai pedagang atau meneruskan usaha batik orangtuanya, sedangkan masyarakat yang tinggal di tepi jalan besar (umumnya keturunan Tionghoa) memanfaatkan rumahnya untuk toko atau perkantoran. Bagian luar Kauman yang ditinggali oleh *teteko* berbentuk deretan pertokoan, bangunan kuno di

area ini sudah hilang digantikan oleh berbagai macam deretan pertokoan berbentuk bangunan baru yang modern. Sedangkan di bagian dalam kawasan, masih banyak terdapat bangunan kuno tempat usaha batik yang layak untuk dikonservasikan. Karsono menggunakan metode observasi jejak fisik (*Observing Physical Traces*) untuk menemukan perubahan bentuk tata ruang. Pengaruh perubahan fisik dan non fisik dicari dengan pendekatan kuantitatif yang diperoleh dari interpretasi data serta perhitungan statistik.

Selain Karsono spasial Kauman juga diteliti oleh Setyaningsih, yang mengemukakan bahwa sistem spasial Kauman merupakan sebaran dari pemukiman dengan Masjid Agung sebagai pusat orientasi. Secara normatif orientasi rumah menghadap ke arah as sumbu utara-selatan, sebagai cerminan dari konsep *mancapat* (Setyaningsih, 2007 : 124-125). Selanjutnya Setyaningsih mengemukakan bahwa *sistem setting* rumah Ketib membentuk kategorisasi ruang dari toponim ketib berikut langgar serta makna identitas sosial-budaya kegiatannya sebagai manifestasi aspek ritual dan cultural (Setyaningsih, 2003 : 15). Kampung Kauman merupakan sebuah lahan milik Karaton Kasunanan Surakarta yang difungsikan sebagai area pemukiman bagi para Ulama Karaton beserta santri-santrinya yang bertugas mengelola Masjid Agung secara *hanggaduh*, para Ulama tersebut mendapatkan gelar Kebangsawanan dari Karaton Kasunanan Surakarta sebagai Ulama Abdi Dalem (Setyaningsih, 2015 : 70). Penelitian Setyaningsih menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pengumpulan data dengan pengamatan empirik di lapangan dan penggalian informasi melalui wawancara kepada pemerintah, swasta serta masyarakat pengguna.

Pelaksanaan upaya revitalisasi kawasan Kauman yang telah diterapkan, dievaluasi oleh Wijayanti (2010 : 36). Kriteria yang dijadikan tolok ukur penilaian yaitu regulasi, pendanaan konservasi, sosialisasi, pelaksana revitalisasi, master plan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pendampingan, perbaikan lingkungan fisik kampung dan pengembangan kegiatan khas. Tanggapan dari *stakeholder* terkait pada program yang telah diusulkan adalah sebagai berikut : Secara garis besar Dinas Tata Kota, Bappeda, Dinas PU, Dinas BudPar dan masyarakat Kauman menyatakan bahwa pelaksanaan revitalisasi cukup efektif. Kekurang efektifan terletak pada pendanaan dan regulasi. Penelitian Wijayanti menggunakan metode deskriptif dengan *Analytical Hierarchy Sistem* atau AHP. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan cara statistik dengan alat bantu komputer, program SPSS. Regulasi menjadi kendala

eksternal untuk revitalisasi Kauman, mengingat di tingkat kota Surakarta belum ada Perda yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pemeliharaan benda-benda cagar budaya. Konservasi yang dilakukan masih mengacu pada Surat Keputusan (SK) Walikota Surakarta Nomor 646/116/1997 tentang penetapan bangunan dan kampung kuno bersejarah. Berdasarkan SK tersebut terdapat 55 bangunan cagar budaya dan 9 kampung cagar budaya yang telah didaftar dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

Menghidupkan kembali identitas budaya pada kawasan Kauman membutuhkan proses yang panjang, nilai kesejarahan sebuah tempat dikontekstualisasikan dengan makna kultural harus diperhatikan untuk merevitalisasinya. Tanpa memperhitungkan kondisi masa lalu dan kaitannya dengan kegiatan manusianya, program revitalisasi seperti sebuah tempelan belaka dan tidak akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Nugroho dan Musyawaroh, 2014 : 8). Nugroho dan Musyawaroh menggunakan metode studi kasus, untuk menemukan keterkaitan antara kasus dengan konteksnya.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.7. Penelitian dan Pembahasan tentang Kauman Surakarta

No. (1)	Penulis/ Peneliti (2)	Pokok Bahasan yang terkait dengan penelitian ini (3)	Metode/ Pendekatan (4)
1.	Sidharta dan Budihardjo, 1989 : 36	Kauman merupakan kampung Islam dan batik kuno	Penyanderaan ( <i>descriptive method</i> )
2.	Karsono, 1996 : 53	Masyarakat Kauman yang tinggal di bagian dalam bermata pencaharian sebagai pedagang atau meneruskan usaha batik orangtuanya, yang tinggal di tepi jalan besar disebut <i>teteko</i> memanfaatkan rumahnya untuk toko/perkantoran.	Observasi jejak fisik ( <i>Observing Physical Traces</i> ) dengan pendekatan kuantitatif
3.	Setyaningsih, 2003 : 15	Sistem setting rumah Ketib adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk identitas religi-ritual dan sosio-cultural, dengan kategorisasi ruang dari toponim rumah Ketib dengan langgarnya</li> <li>• Karakter visual rumah ketib adalah tradisional Jawa berlandaskan Islam</li> <li>• Permukiman terbentuk mengikuti Keraton dengan Masjid Agung sebagai pusat orientasi</li> </ul>	Diskriptif-analitik secara kualitatif dengan proses induksi
4.	Setyaningsih, 2007 : 124-125	Potensi spasial fisik Kauman : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem spasial pemukiman terbentuk dari permukiman abdi dalem ulama dengan Masjid Agung sebagai pusat orientasi</li> <li>• Membentuk katagorisasi ruang dengan toponim nama ulama, langgar serta makna identitas sosial-budaya kegiatannya</li> <li>• Pola jalan tumbuh secara organik berbentuk <i>grid iron</i></li> <li>• Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal dan industri batik</li> </ul>	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem organisasi &amp; hirarkhi ruang menekankan pada konsep serta konsistensi pola aktivitas dan tradisi (<i>closed-ended-plan</i> yaitu pendhopo, dalem &amp; senthong terletak pada satu as-garis keseimbangan)</li> <li>• Orientasi rumah menghadap ke arah as sumbu utara-selatan</li> </ul>	
5.	Musyawaroh, 2007 : 125	Memberikan penilaian terhadap konservasi rumah pengusaha batik Kauman	Kasus tunggal dengan pendekatan diskriptif-kualitatif
4.	Wijayanti, 2010 : 36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria penilaian revitalisasi Kauman : yaitu regulasi, pendanaan konservasi, sosialisasi, pelaksana revitalisasi, master plan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pendampingan, perbaikan lingkungan fisik kampung dan pengembangan kegiatan khas</li> <li>• Tanggapan dari <i>stakeholder</i> : Secara garis besar Dinas Tata Kota, Bappeda, Dinas PU, Dinas BudPar dan masyarakat Kauman menyatakan bahwa pelaksanaan revitalisasi cukup efektif. Kekurang efektifan terletak pada pendanaan dan regulasi.</li> </ul>	Deskriptif dengan <i>Analytical Hierarchy Sistem</i> atau AHP
5.	Nurjayanti, 2012 : 12	Pada rumah tinggal Kauman terdapat nilai-nilai ke-Islaman yang terwujud secara abstrak dan konkrit	<i>single case study</i> dengan analisis kualitatif dan kuantitatif
6.	Musyawaroh, 2008b : 132	Strategi untuk revitalisasi Kauman : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka pendek, menghidupkan kembali usaha batik;</li> <li>• Jangka menengah, menghidupkan kembali kampung santri; dan</li> <li>• Jangka panjang, menjadikan Kauman sebagai kampung wisata religius &amp; batik</li> </ul>	<i>participatory action research</i>
7.	Panuwun, 2012 : 3	Kawasan Kauman sangat potensial untuk dijadikan <i>heritage tourism area</i>	Kasus tunggal dengan pendekatan deskriptif kualitatif
8.	Nugroho dan Musyawaroh, 2014 : 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi harus berlandaskan pada nilai kesejarahan yang dikontekstualisasikan dengan makna kultural.</li> <li>• Tanpa memperhitungkan kondisi masa dengan kegiatan manusianya, program revitalisasi tidak akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat</li> </ul>	Studi kasus

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi warisan budaya yang dimiliki KCB Kauman Surakarta, menemukan pengaruh konservasi potensi warisan budaya pada kondisi lingkungan di KCB Kauman Surakarta dan merumuskan model konservasi berkelanjutan yang tepat untuk KCB Kauman Surakarta. Rumusan tersebut diperlukan untuk melestarikan sumber daya *cultural heritage*, meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penghuni KCB Kauman Surakarta

Dari hasil penelitian tersebut di atas yang dipakai sebagai masukan dalam penelitian ini, yakni Kauman merupakan kampung Islam dan batik kuno, dengan Masjid Agung menjadi pusat orientasi spasial dan pusat kegiatan. Orientasi rumah di Kauman menghadap ke arah sumbu utara-selatan seperti rumah Jawa pada umumnya, akan tetapi

terdapat nilai-nilai ke-Islaman yang terwujud secara abstrak dan konkrit. Selain memanfaatkan rumahnya untuk tempat tinggal, masyarakat Kauman juga memanfaatkan rumahnya untuk tempat usaha. Penduduk asli Kauman yang tinggal di bagian dalam kawasan bermata pencaharian sebagai pedagang atau meneruskan usaha batik orangtuanya sedangkan kaum pendatang (*teteko*) yang tinggal di tepi jalan besar memanfaatkan rumahnya untuk toko/perkantoran.

Kawasan Kauman sangat potensial untuk dijadikan *heritage tourism area*, revitalisasi yang dilakukan harus berlandaskan pada nilai kesejarahan yang dikontekstualisasikan dengan makna kultural agar mendatangkan hasil yang optimal. Strategi revitalisasi yang diterapkan untuk kawasan Kauman sebagai berikut : jangka pendek, menghidupkan kembali usaha batik; jangka menengah, menghidupkan kembali kampung santri; dan jangka panjang, menjadikan Kauman sebagai kampung wisata religius & batik.

Mengembangkan konsep di atas, kriteria yang dijadikan tolok ukur penilaian revitalisasi yaitu regulasi, pendanaan konservasi, sosialisasi, pelaksana revitalisasi, master plan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pendampingan, perbaikan lingkungan fisik kampung dan pengembangan kegiatan khas. Dari hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait menyatakan bahwa secara garis besar pelaksanaan revitalisasi Kauman cukup efektif, kekurangannya terletak pada pendanaan dan regulasi.

#### **4. Sosial, Budaya, Ekonomi, Kosmologi Dan Religius Masyarakat Tradisional Jawa**

##### **a. Sosial Budaya Masyarakat Tradisional Jawa**

Telaah pustaka sosial budaya masyarakat tradisional Jawa diawali dengan mendefinisikan kebudayaan, yaitu berupa keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjoroningrat, 1990 : 181). Pendapat lain menyatakan kebudayaan adalah upaya untuk membumi dengan menelusuri asal etimologis sebagai prosedur standar kerja ilmiah dan solusi memecahkan permasalahan (Kusumohamidjojo, 2009 : 34). Kebudayaan Jawa bukan merupakan satu kesatuan yang homogen, beraneka ragam dan bersifat regional sesuai wilayahnya (Koentjaraningrat, 1994 : 25). Kebudayaan yang hidup di kota Solo dan Yogya merupakan peradaban orang Jawa yang berakar di keraton. Peradaban ini telah ada sejak empat abad yang lalu, memiliki bentuk kesenian dan kehidupan keagamaan yang sinkretistik campuran dari Hindu, Budha dan Islam. Wilayah kerajaan ini juga disebut dengan *Negarigung*. Orang

Jawa menganggap kebudayaan dari masyarakat di tepi pantai Utara Jawa sesuatu yang berbeda, dan disebut kebudayaan *Pesisir*. Masyarakat pesisir memeluk agama Islam puritan yang kuat, wilayah pesisir meliputi Cirebon hingga Gresik (Koentjaraningrat, 1994 : 25-26).

Raja sebagai penguasa, dalam kerajaan Mataram Islam dipandang sebagai *Kalifatullah* atau wakil Allah di dunia. Raja Islam (Jawa) dianggap sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan dijuluki *Sayidin Panatagama Kalifatullah* yang berarti bahwa raja juga sebagai pemimpin agama dan wakil Allah di muka bumi. Nama ini mulai digunakan oleh raja Mataram Sunan Amangkurat II dan kemudian digunakan oleh raja-raja berikutnya (Atmodarminto, 1955 : 106; Hardiyatno, 2000 : 5-6). Masyarakat Jawa (secara mitis) menganggap bahwa raja adalah wakil Allah di muka bumi, sehingga mereka tunduk patuh kepada segala keputusannya dan dianggap tidak dapat ditentang, rakyat hanya dapat menjawab *ndherek kersa dalem* (terserah kepada kehendak raja), kekuasaan yang besar tersebut dikatakan *wenang wisesa ing saknagari* (Moertono, 1985; Moedjanto, 1987; Kuntowidjoyo, 1987 : 7). Penduduk Kauman sebagian besar adalah masyarakat Jawa keturunan abdi dalem ulama dengan para santrinya, yang hingga saat ini masih melestarikan kegiatan dan keyakinan yang dilakukan oleh para leluhurnya.

#### **b. Fham Religius Masyarakat Tradisional Jawa**

Kajian pustaka fham religius masyarakat tradisional Jawa ini diawali dari pendapat yang menyatakan bahwa salah satu sifat dari masyarakat Jawa adalah bahwa mereka religius dan bertuhan, mereka sudah mempunyai kepercayaan akan adanya kekuatan yang melindungi dan mengayomi sebelum datangnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam dan lain-lain (Amin, 2002 : 85). Masyarakat Jawa oleh Hardjowiraga (1984 dalam Amin, 2002 : 85-86), dipandang kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran agamanya. Mereka gampang tergiur mengadopsi kepercayaan, ritual dan tradisi agama lain termasuk tradisi pra Hindu-Budha yang dianggap sesuai untuk mengatasi segala permasalahannya. Hal ini didukung oleh pendapat Geertz dalam Ricklefs (2014 : 397) yang menyatakan bahwa sangat sulit bagi orang Jawa untuk menjadi seorang Muslim sejati, paradigma ini secara implisit menerangkan suatu budaya Jawa asli pada hakekatnya berasal dari pra-Islam yang membatasi islamisasi.

Pada awalnya masyarakat Jawa menganut agama Hindu dan pra Hindu, kemudian agama Islam masuk dan berkembang di Jawa (Demak) setelah era Majapahit. Pada

jaman Kesultanan Demak, Sunan Kalijaga mengenalkan ajaran Islam pada masyarakat Jawa menggunakan sinkretisme (mencampurkan ajaran Hindu-Pra Hindu ke dalam Islam). Hal ini menyebabkan agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa, dan terus berkembang hingga ke periode kerajaan berikutnya. Akan tetapi pada perkembangannya faham religius ini terpecah menjadi sinkretis atau *agami Jawi* dan agama Islam Puritan atau santri (Koentjaraningrat, 1994 : 310; Amin, 2002 : 28). Golongan santri ini juga disebut muslim saleh, sedangkan golongan agama Jawi juga disebut abangan atau Muslim Nominal (Geertz 1960 dalam Pranowo, 2009 : 2).

Selanjutnya Geertz (dalam Pranowo, 2009 : 7-9) menyatakan bahwa Muslim Jawa terbagi menjadi tiga golongan yaitu abangan, santri dan priyayi. Golongan abangan mayoritas terdiri dari masyarakat petani, lebih kuat pengaruh animismenya daripada Islam sehingga cenderung dikategorikan non-muslim. Golongan santri terdiri para pedagang dan petani (yang relatif kaya) bersifat eksklusif dan kurang toleran terhadap kelompok yang lain, mereka melaksanakan ajaran Islam secara murni, lebih ketat dan teratur. Golongan priyayi merupakan keturunan arsitokrat (ningrat) dan pegawai sipil kontemporer, mereka melaksanakan ajaran Islam bercampur dengan Hindu-Budha, serta cenderung memanfaatkan kepemimpinan ideologis dan kultural mereka terhadap kelompok yang lain.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Endraswara (2015 : 156), yang menyatakan bahwa agama Jawa (Kejawen) yaitu agama yang dianut oleh suku Jawa atau suku lain yang menetap di Jawa, bukan sebuah agama terorganisir tetapi perpaduan animisme-Hindu-Budha dengan Kristen, Islam, Katholik. Hindu, Budha, animisme, dinamisme merupakan akar dari agama Kejawen, pengaruh agama lain pada sinkretisme tidak begitu kuat (Amin, 2002 : 92). Hal inilah yang menimbulkan adanya aliran Islam Kejawen, yang merupakan perpaduan antara sinkretisme dengan Islam.

Para penganut Islam Puritan atau santri, menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh tanpa pengaruh sinkretisme (Amin, 2002 : 94). Islam Puritan merupakan ajaran Islam ortodoks yang disebarkan oleh para santri setelah mereka menimba ilmu di negara asal Islam (Timur Tengah), melaksanakan ibadah haji atau berguru pada Wali Songo dan murid-muridnya (Koentjaraningrat, 1994 : 379). Masyarakat Kauman sebagian besar merupakan keturunan dari *abdi dalem ulama* keraton beserta para santrinya yang menganut faham religius Islam Puritan, pandangan dan gaya hidup mereka dipengaruhi oleh faham tersebut.



Pertumbuhan dinasti Kerajaan Mataram Islam dimulai pada awal abad ke-17, Sultan Agung muncul sebagai rekonsiliator yang luar biasa dari dua tradisi dan identitas ini (Ricklefs, 2014 : 410). Sang raja mencontoh konsep penataan spasial bernuansa Islam dari Kerajaan Demak ke Kerajaan Mataram, yang kemudian diikuti oleh raja-raja keturunannya pada periode berikutnya.

Pada masa penaklukan Belanda di Jawa pada periode 1830-1930, tumbuh gerakan reformasi Islam yang dipimpin dan didukung oleh kelas menengah dan berbasis Islam di kota-kota besar Jawa yang memiliki hubungan bisnis dengan pedagang Arab. Mereka mengadopsi gaya hidup Muslim yang lebih saleh, dan sebagian besar menunaikan ibadah haji sehingga semakin terbina hubungan baik dengan Timur Tengah. Pada masa ini terjadi pertumbuhan dramatis dalam jumlah sekolah agama (pesantren) di Jawa. Orang-orang Jawa yang saleh ini menyebut diri mereka *putihan* (yang putih), reformis putihan menjadi tantangan terhadap keyakinan spiritual lokal Jawa yang mistis (Ricklefs, 2014 : 412).

Sesuai teori di atas, *abdi dalem ulama* yang tinggal di Kauman Surakarta juga disebut *abdi dalem pamethakan* (abdi dalem putih atau santri) demikian disebutkan dalam Naskah No. 86 tentang Undang-undang bagi buruh dan pangindhung yang tinggal di tanah Pakauman Surakarta yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono VII yang memerintah tahun 1830-1858 (dikemukakan oleh Puspongoro, Shoim & Muttaqin, 2007 : 25). Masyarakatnya hingga saat ini masih melaksanakan ajaran Islam dengan ketat.

### **c. Makna Rumah bagi Masyarakat Tradisional Jawa**

Kajian tentang makna rumah diawali dari penelusuran tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap bentuk fisik rumah. Bentuk fisik sebuah rumah dipengaruhi sikap dan tanggapan masyarakat terhadap lingkungannya, faktor-faktor tersebut terdiri dari sosial, budaya, ritual, ekonomi dan faktor fisik (kondisi iklim, metode konstruksi, penggunaan material, teknologi). Rumah merupakan fenomena budaya yang terbentuk dari lingkungan pergaulan budaya pemiliknya (Rapoport, 1969 : 46-47). Melengkapi teori tersebut Hendraningsih dkk. (1982 : 10-11), menyatakan bahwa bentuk bangunan dipengaruhi oleh fungsi, simbol, teknologi struktur dan bahan. Selanjutnya Broadbent (1980 : 284), menyatakan bahwa bentuk merupakan serangkaian nilai-nilai yang menimbulkan makna.

Rumah tinggal bagi masyarakat Jawa adalah sebuah bangunan gedung pada daerah tertentu, dalam bentuk ruangan dengan ukuran terbatas yang dimanfaatkan untuk kehidupan keluarga (Ronald, 1997 : 201-202). Menurut Santoso (2000 : 3) rumah atau *omah* menunjukkan sebuah tempat tinggal, tempat sebagian besar praktek domestik (kehidupan rumah tangga) dilakukan dan keberadaan diri terekspresikan. *Omah* adalah nukleus membentuk ranah domestik yang diikat oleh kedekatan spatial, jejaring aktivitas dan pemahaman makna bersama di lingkup inilah gagasan-gagasan utama kebudayaan diproduksi.

Tujuan masyarakat Jawa untuk membangun rumahnya tidak semata-mata hanya memenuhi tuntutan kebendaan, akan tetapi juga berusaha memenuhi tuntutan rohaniannya agar memperoleh ketenteraman hidup (Ronald, 1998 : 28). Selanjutnya Ronald (1993 : 7), menyatakan bahwa masyarakat Jawa mempunyai keinginan mempunyai tempat tinggal yang dapat menampung semua kegiatannya yang memenuhi syarat sebagai tempat untuk :

- 1) Melaksanakan ibadah
- 2) Melakukan komunikasi secara metafisik
- 3) Mengembangkan pangan, sandang dan papan
- 4) Melakukan kegiatan bermasyarakat, berusaha, belajar dan mempertahankan diri dari tindak kejahatan.

Teori ini diperkuat oleh Turner & Fichter (1972) dan Budihardjo (1997), yang menyatakan bahwa rumah dalam perkembangannya tidak hanya berfungsi sebagai hunian saja tetapi akan tetapi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penghuninya, termasuk sebagai sarana dalam mengembangkan usaha.

Pengelompokkan rumah berdasarkan fungsinya dibagi dalam dua kategori, yaitu rumah yang hanya dipergunakan sebagai tempat tinggal dan pada umumnya dihuni oleh golongan menengah keatas serta rumah yang digunakan untuk usaha atau kegiatan ekonomi yang biasanya digunakan untuk golongan menengah kebawah (Silas, 2000). Perkembangan fisik rumah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi keluarga, dengan pengertian bahwa rumah akan berkembang sesuai dengan kehendak penghuni, kemampuan dan peluang yang ada serta sejalan dengan proses perkembangan biologis, sosial dan ekonomi keluarga. Rumah bagi keluarga Jawa disebut dengan papan yang merupakan lingkungan kehidupan manusia, menyesuaikan diri dengan keseimbangan yang telah ada, untuk menggalang hubungan antar anggota keluarga sehingga berakibat

bangunan rumah Jawa selalu dipersiapkan tidak hanya terbatas pada kepentingan keluarga inti saja tetapi bisa menampung tipe keluarga majemuk (Ronald, 1997 : 245).

Secara garis besar tata ruang rumah tradisional Jawa terdiri dari rumah induk dan rumah tambahan Frick (1997). Secara terperinci ruang-ruang tersebut terdiri dari Hu et al. (1989 dalam Frick 1997) :

- 1) Rumah induk, meliputi : a) Pendopo berfungsi sebagai tempat berkumpul orang banyak dan menerima tamu, berupa ruang terbuka, bersuasana akrab dan berfungsi sebagai bangunan penerimaan, terletak di dekat regol; b) dalem merupakan pusat susunan ruang-ruang lainnya, fungsi utama sebagai ruang keluarga yang bersifat pribadi, suasana di dalamnya tenang dan berwibawa, pada bagian belakang dalem terdapat sentong; c) sentong merupakan tiga buah ruang berjajar, sentong kiwo dan tengen digunakan sebagai tempat tidur tuan rumah dan menyimpan harta benda, sentong tengah untuk tempat pemujaan terhadap Desi Sri (disebut juga Krobongan); d) pringgitan berbentuk seperti serambi yang menghadap pendopo, mempunyai fungsi utama sebagai tempat pagelaran wayang kulit; e) tratag merupakan gang di antara pendopo dan pringgitan.
- 2) Rumah tambahan terletak di samping dan di belakang rumah induk, meliputi : a) Gandok adalah rumah-rumah di samping dalem, berupa gandok kiwo (wetan omah) untuk tidur laki-laki dan gandok tengen (kulon omah) untuk kaum perempuan, biasanya terdapat halaman pribadi antara dalem dengan gandok; b) gadri atau ruang makan terletak di belakang sentong, sifatnya semi terbuka dan berbentuk emper; c) dapur atau pawon dan pekiwan (KM/WC) sebagai pelayanan terletak paling belakang.

Walaupun warga Kauman adalah masyarakat Jawa dan keturunan *abdi dalem* keraton, karena pengaruh budaya religius (santri) yang dianutnya tata ruang rumahnya sedikit berbeda dengan tata ruang rumah masyarakat Jawa tradisional pada umumnya.

#### **d. Konsep Ekonomi Masyarakat Tradisional Jawa**

Surakarta telah lama dikenal sebagai kota perdagangan. Salah satu komoditi andalannya adalah batik tulis, batik cap dan batik printing. Sentra perdagangan batik berlokasi di Pasar Klewer, sedang sentra produksi batik di Laweyan dan Kauman, serta tersebar di pinggiran kota (Wijaya, 2010 : 1). Di Kauman pada di seitar tahun 1960an tinggal para saudagar batik yang mempekerjakan tukang batik wanita 15-30 orang, para saudagar ini taat dalam melaksanakan ajaran Islam. Pandangan dan gaya hidup mereka

didasari oleh Islam, berbeda dengan priyayi Jawa pada umumnya (Geertz, 1963 dalam Koentjoroningrat, 1994 : 233).

Pada awal abad ke 20, di bawah hegemoni budaya Karaton Kasunanan Surakarta telah dikenal juragan *Mbok Mase* (julukan juragan batik perempuan di Solo), sebagai pekerja keras, disiplin, ulet, tidak gila hormat, tapi hemat, tidak mau kompromi, menabung dan tidak berfoya-foya. Juragan *Mbok Mase* berhasil meningkatkan unit-unit usaha batik, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Laweyan, Surakarta (Soedarmono, 2006). Selain berkembang di Laweyan, usaha batik juga berkembang di Kauman. Pada mulanya pihak keraton mengajari istri *abdi dalem* ulama Kauman membatik untuk konsumsi keraton. Hal ini didukung oleh pendapat Utari dan Prawironegoro (2017 : 213), sistim ekonomi feodalisme menuntut para pekerja memenuhi kebutuhan pokok penguasa selain pajak dan upeti.

Keahlian tersebut kemudian berkembang pesat menjadi home industry batik, Koentowidjoyo (1987: 8-12) berpendapat kegiatan ekonomi terjadi akan berkembang pesat bila terdapat permintaan, penawaran dan produksi suatu barang. Periode ini merupakan awal kegiatan ekonomi dan perdagangan batik dikawasan tersebut. kegiatan ekonomi semakin berkembang pesat dengan letak kawasan yang berada di pusat kegiatan keagamaan, pendidikan dan pemerintahan (Kentjoroningrat, 1995: 331).

Pemerintah Kolonial Belanda pun sangat khawatir dengan kekuatan sosial ekonomi penduduk pribumi muslim, maka, ia melakukan serangkaian tekanan politik ekonomi yang mengakibatkan Sarekat Dagang Islam dan jaringan perdagangan batik pribumi menjadi lemah. Kemunduran tersebut berangsur-angsur menimbulkan fragmentasi usaha, dari unit usaha industri rumah tangga mandiri terpecah-pecah ke dalam unit-unit spesialisasi mbatik, wedelan, babaran, mbironi, dan prembetau pemborong pekerjaan. Mode produksi batik bergeser dari industri rumah tangga mandiri ke nempakke, yaitu jaringan hubungan produksi antar unit-unit usaha produksi terspesialisasi (Soedarmono, 2006:50 & 119).

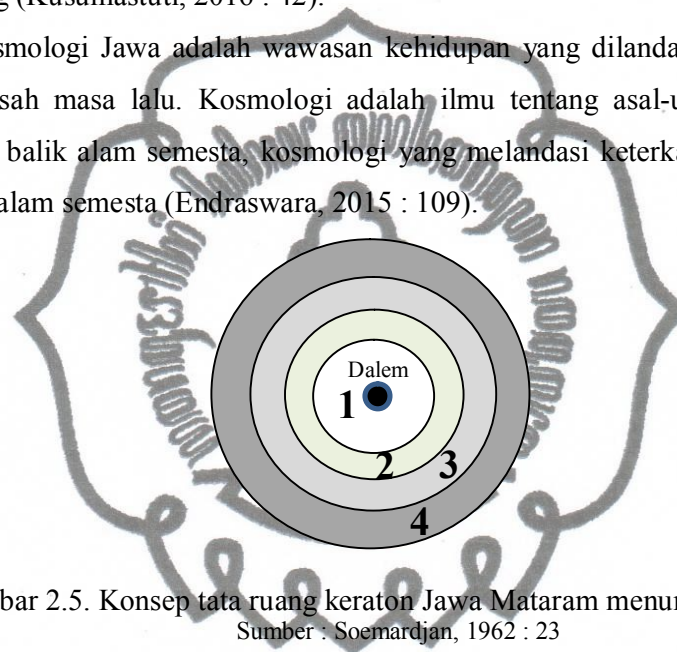
#### **e. Sistem Spasial Kerajaan Mataram Islam**

Tata kota Mataram Islam dikembangkan dari tata kota Majapahit dan Demak, Masjid Agung menjadi elemen perkotaan selalu diletakkan di sisi Barat alun-alun. Di belakang Masjid Agung berkembang kawasan Kauman sebagai elemen perkotaan yang baru (Zahnd, 2008 : 27).



Sejak berdirinya hingga saat ini, Kota Solo mengalami tiga model perkembangan perkotaan, yaitu sebagai kota tradisional (antara 1745-1870), kota kolonial (1870-1945) dan kota modern (1945 ke depan). Disebut kota tradisional karena struktur ruang kota dibentuk oleh Kraton Solo dengan konsep Kosmologi Jawa dimana hierarkhi sosial sangat berpengaruh dalam pengorganisasian kota. Sebagai kota Kolonial, Kota Solo menjadi pusat bagi kegiatan pendidikan, ekonomi, administrasi dan jasa pelayanan, untuk mendukung motif Kolonial sebagai bangsa penjajah dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kota modern berawal dari Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sekarang (Kusumastuti, 2016 : 42).

Kosmologi Jawa adalah wawasan kehidupan yang dilandasi oleh keyakinan pada kisah-kisah masa lalu. Kosmologi adalah ilmu tentang asal-usul eksistensi manusia Jawa di balik alam semesta, kosmologi yang melandasi keterkaitan antara orang Jawa dengan alam semesta (Endraswara, 2015 : 109).

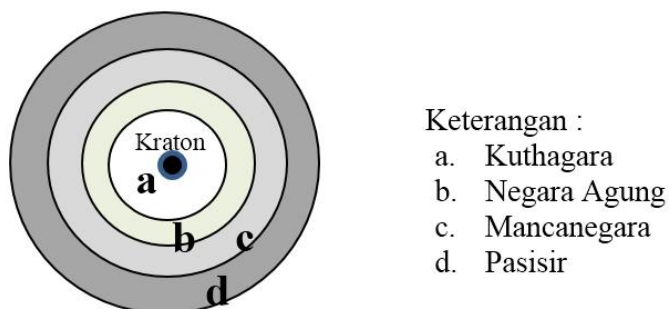


Gambar 2.5. Konsep tata ruang keraton Jawa Mataram menurut Soemardjan  
Sumber : Soemardjan, 1962 : 23

Konsep Kota Solo tradisional berlandaskan kosmologi masih bisa lestari hingga saat ini. Konsep kosmologi yang digunakan adalah konsep kosmologi Keraton Jawa Mataram Islam yang terbentuk dari susunan hirarkhis sistem 4 lingkaran dengan sultan atau raja berada di tengah sistem tersebut (Selo Soemardjan, 1962 : 23-26; Santoso, 2008 : 117-119). Susunan 4 lingkaran tersebut terdiri dari : 1) Keraton; 2) Negara; 3) Negara Agung dan; 4) Mancanegara. Lihat gambar 2.5.

Lingkaran ke satu merupakan lokasi Keraton (tempat tinggal raja dengan keluarganya), serta tempat pengelolaan administratif pemerintahan. Lingkaran ke dua yang disebut Negara atau pusat kerajaan, merupakan lokasi tempat bermukim kaum bangsawan dan pegawai keraton tingkat tinggi, gedung-gedung pemerintahan, Masjid Agung serta alun-alun. Lingkaran tiga disebut Negara Agung, merupakan daerah

wilayah kekuasaan berupa tanah *gaduhan*/hak guna pakai yang dikepalai oleh seorang *patuh*. Lingkaran ke empat disebut mancanegara, merupakan wilayah pedesaan yang dikepalai oleh seorang bupati dengan jajaran pamong prajanya (Soemardjan, 1962 : 23-25; Santoso, 2008 : 117-119). Dalam konsep ini kawasan Kauman terletak pada lingkaran ke dua, berlokasi di sekitar (sebelah Barat dan Utara) Masjid Agung.

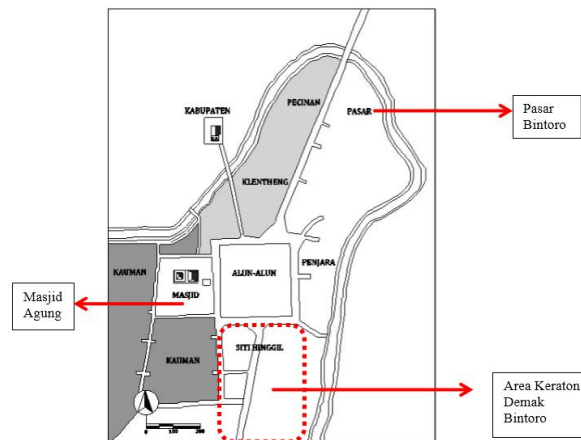


Gambar 2.6. Konsep tata ruang keraton Jawa Mataram menurut Behrend

Sumber : Behrend, 1982 : 172

Konsep yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Behrend (1982 : 170-173) yang menyatakan bahwa konsep kosmologi tata ruang Keraton Jawa Mataram Islam terdiri dari : a) Kuthagara atau Kutha Nagara sebagai pusat kosmologi, merupakan area tempat tinggal raja dengan otoritas raja langsung dan absolut; b) Negara Agung dengan otoritas raja di absolut tapi tidak langsung, area ini dibagi menjadi 8 wilayah termasuk tanah *lungguh* para *abdi dalem* yang mensupport kegiatannya; c) Manca Negara, wilayah ini dikuasai oleh seorang Bupati (kerabat keraton) yang terbagi menjadi wilayah Timur dan Barat; d) Pasisir, merupakan wilayah yang telah ditaklukkan oleh Mataram dan diberi kepercayaan untuk mandiri dibawah kekuasaan Mataram. Dalam konsep ini kawasan Kauman berlokasi di lingkaran b, Negara Agung. Lihat gambar 2.6.

Konsep tata ruang wilayah Keraton Surakarta mengikuti konsep tata ruang Keraton Demak. Hal ini dikarenakan raja Surakarta adalah keturunan dari raja Demak, pada akhir masa kejayaannya Keraton Demak Bintoro dipindahkan oleh Sultan Hadiwijaya (nenek moyang raja Mataram Islam) ke Pajang Kartasura dan berganti nama menjadi Keraton Pajang. Pada masa pemerintahan Paku Buwono II tahun 1745, keraton ini kemudian dipindahkan dari Pajang ke Sala dan diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat. Konsep tata ruang Keraton Demak dapat dilihat pada gambar 2.7.



Gambar 2.7. Tata ruang wilayah Keraton Demak Bintoro

Sumber : digambar kembali dari Solichin Salam 1960 dalam Sejarah Masjid Agung Surakarta, 2014

Pola tata ruang dari Keraton Mataram Islam mengacu pada pola tata ruang Kerajaan Demak, yang mempunyai 4 elemen dalam pembentukan pusat pemerintahannya yakni Keraton, Masjid Agung, penjara dan pasar. Ke 4 elemen ini dimiliki semua pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam setelah Demak, yakni kerajaan Pajang di Kartasura (Sultan Hadiwijoyo pada tahun 1568-1586), kerajaan Mataram di Kotagede (Panembahan Senopati pada tahun 1586-1625), kerajaan Mataram di Plered (Sultan Agung pada tahun 1625-1677), kemudian diterapkan di kerajaan Surakarta (mulai Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai sekarang) dan kerajaan Yogyakarta (mulai Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sampai sekarang) demikian dikemukakan oleh Satoso (2008 : 145-157).

Alun-alun keraton Demak masih tetap keberadaannya hingga saat ini, dari data arkeologi ditemukan bahwa *Sitinggil* Keraton Demak terletak di sebelah Selatan Alun-alun. Masjid Agung Demak berlokasi di sebelah Barat alun-alun dan pasar berlokasi di Utara Timur alun-alun, sesuai dengan keberadaannya saat ini (Adrisijanti, 2000). Pola spasial ini ditiru oleh Keraton Surakarta Hadiningrat.

Pembentuk kota tradisional Jawa menurut Ikaputra (1995 : 23-24), terdiri dari 4 komponen kraton, alun-alun, masjid dan pasar. Sejak kerajaan Demak hingga kerajaan Mataram Islam terakhir (Surakarta dan Yogyakarta), selalu memiliki masjid kerajaan yang disebut Masjid Agung dan menjadi bagian yang penting dalam penataan kota. Masjid Agung diletakkan dekat dengan kraton agar penguasa (raja) bisa merangkul kehidupan religius dalam sistem kekuasaannya (Wiryomartono, 1995 : 9 dan 25).

Selain konsep tata ruang tersebut di atas, ada dua macam sumbu sakral yang digunakan oleh kota kuno di Jawa. Sumbu tersebut adalah sumbu Utara-Selatan, yang membagi antara tempat tinggal penguasa atau raja dan rakyat biasa. Dan sumbu Barat-Timur, yang membagi wilayah sakral dengan wilayah profan. Penerapan konsep tersebut pada wilayah Keraton Surakarta adalah sebagai berikut : Sumbu kosmologis Utara-Selatan Keraton Surakarta adalah arah Utara ke Alas (hutan) Krendowahono, arah Selatan ke Laut Kidul (Laut Selatan). Sedangkan sumbu Timur-Barat, arah Timur ke Gunung Lawu dan arah Barat ke Gunung Merapi (Woodward, 1991 : 317-319; Hardiyatno, 2000 : 89).

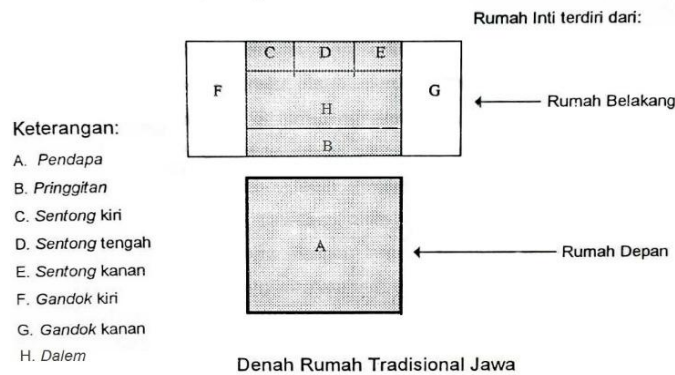
Sumbu Utara-Selatan membagi kota menjadi dua bagian, bagian Selatan bersifat sakral merupakan lokasi dari Keraton, Masjid Agung, rumah-rumah pangeran dan rumah abdi dalem ulama keraton. Sedangkan bagian Utara bersifat profan, merupakan lokasi dari Benteng Vastenburg, Pasar Gede, Penjara, Pecinan dan permukiman Eropa (Jo Santoso, 2008 : 163). Sumbu Utara-Selatan ini diterapkan di semua keraton Jawa dengan lokasi penguasa di as-poros Selatan. Konsep kosmologis tersebut menunjukkan keeratan hubungan antara Kauman sebagai tempat tinggal abdi dalem ulama (bagian dari Masjid Agung) dengan kraton sebagai tempat tinggal raja (sumbu kosmologis).

#### **f. Spatial Setting Permukiman Tradisional Jawa**

Menurut Rapoport (1969 : 46), perbedaan bentuk rumah merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa dijelaskan secara tunggal. Sikap dan tanggapan masyarakat yang berbeda terhadap lingkungan, membuat lingkungan fisik bervariasi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh sosial, budaya, ritual, ekonomi dan fisik. Rumah merupakan fenomena budaya yang terbentuk oleh lingkungan pergaulan budaya pemiliknya.

Masyarakat Jawa mengklasifikasikan dirinya menjadi beberapa golongan, yaitu : 1) golongan kaum bangsawan dan pejabat; 2) golongan pedagang dan kaum cendekiawan; 3) golongan rakyat jelata (Ronald, 1999 : 50). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Nurhajarini, dkk. (1999), masyarakat keraton Surakarta dibagi ke dalam tiga kelompok sosial, yaitu : 1) raja dan keluarga raja (*sentana dalem*); 2) pegawai dan pejabat kerajaan (*abdi dalem*); 3) rakyat biasa (*kawula dalem*). Perbedaan kelompok ini berpengaruh pada bentuk rumahnya. Masyarakat Jawa menganggap bahwa golongan priyayi, bangsawan atau pejabat lebih mempunyai kekuasaan, yang kemudian dijadikan pedoman pada pengelolaan spasial lingkungan rumah tinggal dan menjadi pusat orientasi bagi lingkungan (Ronald, 1990).





Gambar 2.8. Denah Rumah Tradisional Jawa

Sumber : Ronald, 1999 : 67

Rumah masyarakat Jawa pada umumnya terdiri dari rumah depan (*omah ngarep*) dan rumah belakang (*omah mburi*). Tata ruang Rumah depan (*pendhapa*) untuk menerima tamu, *pringgitan* untuk pertunjukan wayang dan rumah belakang untuk tempat tinggal serta tidur keluarga (Hamzuri, t.t. : 79; Ronald, 1999 : 67). Lihat gambar 2.8.

Menurut Ronald (2005) bentuk rumah masyarakat Jawa digolongkan menjadi tiga yaitu : 1) kalangan atas (bangsawan) dengan bentuk rumah bertipe joglo dengan pendapa, paringgitan, dalem yang ditambah deretan rumah di kanan dan kiri, mempunyai halaman yang luas, dikelilingi tembok yang tinggi dan diberi regol; 2) kalangan menengah (orang kaya atau terpandang) dengan bentuk rumah bertipe limasan; 3) dan kalangan bawah (masyarakat kebanyakan) dalam bentuk rumah bertipe kampung. Bentuk bangunan rumah yang digunakan oleh raja dalam bangunan keraton seperti joglo, limasan, sinoman, semar tinandhu, dan segala bentuk modifikasinya, ditiru oleh para sentana dan abdi dalem. Kawula dalem dan orang-orang yang tidak menjabat, hanya diperbolehkan menggunakan bentuk rumah kampung, dara gepak, gedang selirang, panggang pe, dan sebagainya (Radjiman, 1988 dalam Nurhajarini dkk., 1999).

## 5. Teori-teori Perencanaan Kawasan

Teori perencanaan kawasan digunakan untuk menganalisis tekstur dan pola-pola tata ruang perkotaan, dinamika hubungan ruang kota, menjelaskan fungsi dan makna ruang kota melalui tanda kehidupan perkotaan dan kontekstualnya serta menganalisis elemen pembentuk citra kawasan. Pembahasan diawali dari skala yang lebih luas yakni ekosistem, yang didefinisikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Setyono, 2011 : 1). Ekosistem merupakan benda nyata yang mempunyai ukuran beraneka ragam sesuai dengan tingkat organisasinya (Frick dan Suskiyatno, 2007 : 3).

Kawasan merupakan bagian dari ekosistem, mewadahi keseimbangan hubungan timbal balik antara makhluk hidup/biotik (manusia, tumbuhan) dan abiotik (lahan, bangunan, saluran, jalan). Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu (Badan Standardisasi Nasional, 2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). Batas dan luasan kawasan (diliniasi) menurut Peraturan Menteri PU No. 6/PRT/M/2007, ditentukan berdasarkan pada butir-butir sebagai berikut.

- 1) Administratif, yakni RT, RW, kelurahan, kecamatan dan lain-lain.
- 2) Nonadministratif, yakni ditentukan secara kultural-tradisional seperti desa adat, kampung, nagari.
- 3) Kesatuan tematis, yakni kawasan kota lama, kawasan industri dan lain-lain.
- 4) Campuran, yakni memiliki fungsi yang beragam hunian, usaha, sosial-budaya dan atau keagamaan, industri dan lain-lain.
- 5) Jenis kawasan, yakni kawasan pelestarian, kawasan baru, kawasan rawan bencana dan lain-lain.

Mendukung teori di atas Ali Madanipour (dalam Zahnd, 1999 : 2) menjelaskan bahwa sebuah kawasan kuno obyek pelestarian, merupakan kumpulan berbagai bangunan dan artefak serta tempat untuk berhubungan sosial. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010 Bab. I Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa definisi kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Untuk meneliti sebuah kawasan menurut Trancik diperlukan pendekatan melalui tiga kelompok teori yaitu teori *figure ground*, teori *linkage* dan teori *place*. Teori *figure ground*

membahas tentang hubungan antara bentuk terbangun (*building mass*) dengan ruang terbuka (*open space*) dalam bentuk blok *solid* dan *void*. Digunakan untuk mengidentifikasi tekstur dan pola-pola tata ruang perkotaan (*urban fabric*) serta keteraturan massa/ruang perkotaan. Tekstur *figure ground* juga dapat dipakai untuk menjelaskan fungsi dan hubungan ruang dalam kawasan (Zahnd, 1999 : 70, 79, 94).

Teori *linkage* membahas tentang dinamika hubungan ruang kota yang dianggap sebagai generator kota tersebut. Digunakan untuk memperhatikan dan menegaskan hubungan-hubungan dan gerakan-gerakan tata ruang perkotaan. Ada tiga macam *linkage* perkotaan yaitu : *linkage* visual, *linkage* struktural dan *linkage* bentuk kolektif. Penghubung bagian-bagian kota satu sama lain perlu diketahui, sehingga kawasan-kawasan dalam kota bisa dipahami sebagai suatu hirarkhi yang kompleks/menyeluruh (Zahnd, 1999 : 107 & 136). Teori *place* membahas tentang makna kepentingan tempat-tempat perkotaan yang terbuka terhadap sejarah, budaya dan sosialisasinya. Digunakan untuk menjelaskan fungsi ruang kota melalui tanda kehidupan perkotaan dan kontekstualnya. Sebuah *palce* menurut Schultz adalah *space* yang memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya Trancik mengemukakan bahwa sebuah *space* akan ada kalau dibatasi sebuah *void*, dan *space* akan menjadi *place* kalau mempunyai arti bagi lingkungan yang berasal dari budaya daerahnya (Zahnd, 1999 : 137-176).

Teori yang terkait dikemukakan oleh Ekomadyo (2012 : 1), yang menyatakan bahwa konsep tentang arti sebuah tempat dalam arsitektur dikenal dengan “*Genius Loci*”, istilah ini dipopulerkan oleh Schultz yang dituliskan merujuk pada konsep dari masyarakat Romawi Kuno. *Genius Loci* ini terbentuk dari proses interaksi antara manusia dengan lingkungan fisiknya, saat manusia memanfaatkan, merawat, dan membangun makna di dalamnya. Setiap tempat mempunyai *Genius Loci* yang khas (*spirit of the place*), yang memberikan jiwa bagi mereka yang menghuninya untuk tetap mengembangkan daya hidup sepanjang masa.

Makna sebuah kawasan bagi seorang pengamat ditentukan oleh sistem visual atau kualitas fisik yang diberikan kawasan tersebut kepada pengamat (Lynch, 1960 : 1-9). Pada kawasan yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, pengendalian citra kawasan diperlukan untuk mempertahankan nilai historis dan budayanya (Solikhah dkk., 2011 : 3). Secara lebih spesifik Lynch (1960 : 46-48) mengemukakan ada lima elemen pembentuk citra kawasan, yang disebutkan sebagai berikut.

1) *Path* (jalur).

Merupakan jalur sirkulasi yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya dan bersifat linier (satu dimensional). *Path* akan mempunyai identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan yang jelas, penampakan yang kuat (*fasade*, pohon, dan lain-lain), atau belokan yang jelas. Selain terbentuk oleh jalur sirkulasi, karakteristik fasade bangunan di sepanjang *path* juga berperan penting dalam menciptakan identitas/karakter pada sebuah kawasan.

2) *Edge* (tepi).

Merupakan batas atau peralihan antara dua daerah yang berbeda karakter. *Edge* memiliki identitas yang lebih baik jika kontinuitas tampak jelas batasnya.

3) *District* (kawasan).

Merupakan suatu daerah (bagian dari kota) dengan ciri kegiatan tertentu dan bersifat dua dimensional serta dapat dikenali. *District* mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas dan dapat dilihat homogen, serta fungsi dan posisinya jelas.

4) *Nodes* (simpul).

Merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis dimana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain. *Node* mempunyai identitas yang lebih baik jika tempatnya memiliki bentuk yang jelas serta tampilan berbeda dari lingkungannya (fungsi, bentuk).

5) *Landmark* (penanda).

Merupakan bentuk visual yang menonjol yang bisa sebagai ciri khusus pada suatu kawasan.

Hakim (2007 : 160), dalam penelitiannya menemukan pola tata ruang yang khas terdapat pada kawasan permukiman di negara-negara Islam. Komponen tersebut adalah: (1) gang-gang sempit dan *cul-de-sacs*; (2) pembatasan lokasional dengan menggunakan tembok tinggi masif untuk mengantisipasi polusi asap, bau, dan kebisingan; (3) meletakkan pintu, jendela pada lokasi yang lebih tinggi dari gang atau jalan; (4) dinding antar tetangga yang tinggi dan masif untuk melindungi kepemilikan dan penggunaan; (5) drainase hujan dan air limbah tidak optimal.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup (biotik) dengan



lingkungannya (abiotik). Ekosistem mempunyai ukuran beraneka ragam sesuai dengan tingkat organisasinya, kawasan merupakan bagian dari ekosistem.

Untuk meneliti sebuah kawasan yang mempunyai banyak bangunan kuno digunakan pendekatan melalui tiga kelompok teori yaitu *figure ground*, *linkage* dan *place*. Teori *figure ground* digunakan untuk mengidentifikasi tekstur dan pola-pola tata ruang perkotaan (*urban fabric*), keteraturan massa/ruang perkotaan, serta menjelaskan fungsi dan hubungan ruang dalam kawasan. Teori *linkage* digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan dan gerakan-gerakan dalam tata ruang perkotaan, sehingga kawasan-kawasan dalam kota bisa dipahami sebagai suatu hirarkhi yang kompleks/menyeluruh. Teori *place* digunakan untuk menjelaskan fungsi ruang kota bagi lingkungan melalui tanda kehidupan perkotaan setempat dan kontekstualnya.

Setiap tempat mempunyai *Genius Loci* yang khas (*spirit of the place*), yang memberikan jiwa bagi yang menghuni untuk tetap mengembangkan daya hidupnya. Pengendalian citra kawasan diperlukan untuk mempertahankan nilai historis dan budaya pada kawasan yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Lima elemen yang membentuk citra kawasan, yaitu : *path* (jalur), *edge* (tepi), *district* (kawasan), *nodes* (simpul), *landmark* (penanda).

#### a. Teori Kawasan Permukiman yang Sehat

Teori kawasan permukiman yang sehat diperlukan untuk menganalisis persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah kawasan supaya sehat, aman dan nyaman untuk dihuni. Kawasan Kauman merupakan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan.

Seluruh umat manusia mendambakan untuk dapat tinggal di permukiman yang layak, sesuai dengan yang dikemukakan dalam Deklarasi Istambul 1996 pada Konferensi PBB Habitat II. Tujuan dari agenda habitat II adalah hunian yang layak bagi semua (*adequate shelter for all*) dan permukiman yang berkelanjutan dalam dunia yang semakin mengkota (*sustainable human settlements in an urbanizing world*) atau sekarang disebut sebagai *sustainable urbanization*. Hunian yang layak penting untuk kesejahteraan manusia, baik dari segi fisik, fisiologis, sosial dan ekonomi. Sementara pembangunan berkelanjutan membutuhkan pembangunan sosial-ekonomi dan perlindungan lingkungan (Winayanti, 2008 : 1-2).

Definisi kawasan permukiman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan permukiman yang sehat merupakan faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Konsep penataannya melibatkan pendekatan sosiologis dan teknis; pengelolaan faktor risiko dan berorientasi pada lokasi, pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya; serta mencakup unsur apakah rumah tersebut memiliki penyediaan air minum dan sarana yang memadai untuk memasak, mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah lainnya (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001).

Konsep dasar penataan bangunan dan lingkungan menurut PermenPU No. 06/PRT/M/2007, disebutkan sebagai berikut.

- 1) Secara fungsional meliputi kejelasan distribusi intensitas pemanfaatan lahan, skala ruang yang manusiawi dan berorientasi pada pejalan kaki, kejelasan skala pengembangan, pengaturan pengembangan kepadatan kawasan.
- 2) Secara fisik meliputi penataan estetika, karakter dan citra (*image*) kawasan.
- 3) Secara lingkungan meliputi keseimbangan kawasan perencanaan dengan wilayah sekitar, keseimbangan daya dukung lingkungan, pelestarian ekologis kawasan, pemberdayaan kawasan.
- 4) Dari sisi pemangku kepentingan melalui kepentingan bersama antar pelaku.

Sebuah kawasan permukiman agar dapat berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang layak, nyaman dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan bagi penghuninya harus dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas lingkungan yang memadai.

Prasarana lingkungan pemukiman menurut SNI 03-6981-2004 adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana lingkungan berupa jaringan jalan, jaringan saluran air limbah dan jaringan drainase. Adapun utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, yang berupa jaringan air bersih, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas.

Prasarana lingkungan menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 terdiri dari jaringan jalan, air limbah, drainase dan pengendalian banjir dan persampahan. Utilitas umum terdiri dari air bersih dan pemadam kebakaran. Prasarana lingkungan pemukiman menurut Keman (2005 : 32) adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematuan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas dan sebagainya.

Sarana lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, sarana lingkungan terdiri dari sarana niaga, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum, RTH (taman dan pemakaman umum) dan sarana sosial budaya.

Sarana lingkungan pemukiman menurut SNI 03-6981-2004 merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang terdiri dari fasilitas niaga atau tempat kerja, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum, fasilitas ruang terbuka, taman dan olah-raga. Ditambah dengan fasilitas umum seperti Puskesmas, Taman Kanak-kanak, tempat bermain, pos polisi, yang diperlukan sebagai sarana penunjang pelayanan lingkungan.

Sarana lingkungan pemukiman menurut Keman (2005 : 32) adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Contoh sarana lingkungan pemukiman adalah fasilitas pusat perbelanjaan, pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan, tempat peribadatan, rekreasi dan olah raga, pertamanan dan pemakaman. Selanjutnya istilah utilitas umum mengacu pada sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan pemukiman, meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, dan pemadam kebakaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah kawasan permukiman agar dapat berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang layak, sehat, nyaman dan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan bagi penghuninya

harus dilengkapi dengan sarana lingkungan sebagai berikut : fasilitas niaga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum, fasilitas ruang terbuka, taman rekreasi dan olah-raga serta pemakaman. Ditambah dengan fasilitas umum seperti Puskesmas, Taman Kanak-kanak, tempat bermain, pos polisi, yang diperlukan sebagai sarana penunjang pelayanan lingkungan.

Prasarana lingkungan yang dibutuhkan meliputi : jaringan jalan, jaringan saluran air limbah dan jaringan drainase. Dan dilengkapi dengan utilitas umum untuk pelayanan lingkungan yang terdiri dari jaringan air bersih, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon dan pemadam kebakaran.

Hal lain yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

- 1) Kejelasan distribusi intensitas pemanfaatan lahan, pengembangan dan pengaturan pengembangan kepadatan kawasan.
- 2) Penataan estetika, karakter dan citra (*image*) kawasan.
- 3) Keseimbangan kawasan perencanaan dengan wilayah sekitar, daya dukung lingkungan, pelestarian ekologis dan pemberdayaan kawasan.
- 4) Mempertemukan kepentingan bersama antar pelaku.

#### **b. Sarana Lingkungan**

Sarana yang dibutuhkan agar lingkungan layak, sehat, nyaman dan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan bagi penghuninya terdiri dari : fasilitas niaga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum, fasilitas ruang terbuka, taman rekreasi dan olah-raga serta pemakaman. Ditambah dengan fasilitas umum seperti Puskesmas, Taman Kanak-kanak, tempat bermain, pos polisi (keamanan), yang diperlukan sebagai sarana penunjang pelayanan lingkungan. Perincian kebutuhan sarana lingkungan yakni sebagai berikut.

Akan tetapi yang menjadi fokus utama permasalahan sarana lingkungan di Kauman adalah fasilitas ruang terbuka hijau serta taman rekreasi dan olah-raga.

##### **1) Fasilitas Ruang Terbuka Hijau**

Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang terbuka yang dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu dan digunakan secara intensif seperti halaman sekolah, lapangan olahraga dan lain-lain. Sedangkan zona hijau bisa berbentuk jalur (*path*), jalur hijau jalan, tepian air waduk, bantaran sungai, bantaran rel kereta api,



jejaring listrik tegangan tinggi; dan simpul kota (*nodes*) yang beberapa taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota dan seterusnya (Prasetyaningsih, 2012 : 3).

Menurut PermenPU No. 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua yakni RTH privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. Dan RTH publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Dasar kebijakan tentang penataan ruang terbuka hijau berlandaskan pada Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dengan tujuan : pertama, meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan; dan kedua, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi masyarakat banyak. Baik RTH publik maupun RTH privat memiliki beberapa fungsi utama (intrinsik) yaitu ekologis serta fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika atau arsitektural.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas : a) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan, kenyamanan dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah); b) manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada dasarnya juga menjadi wadah yang dapat menampung kegiatan dan aktifitas tertentu dari warga setempat ataupun secara berkelompok (Hakim, 2000 : 1). Sebagai wadah untuk tempat rekreasi atau kegiatan sosial lainnya, ruang terbuka lingkungan sering disebut dengan Taman Lingkungan. Bentuk ruang terbuka ini tergantung pada pola dan susunan massa bangunan.

Selain berfungsi sebagai tempat rekreasi, ruang terbuka ini juga mempunyai fungsi ekologis sebagai penyegar udara, penyerap air hujan, pengendali banjir, membantu proses *recycling*, memelihara ekosistem tertentu; berfungsi estetis sebagai pembentuk efek keindahan lingkungan lansekap dan pelembut arsitektur bangunan.

Ruang terbuka hijau ditinjau dari kegiatannya (Hakim, 1987), dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Ruang terbuka aktif, adalah ruang terbuka yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya, antara lain bermain, olahraga, upacara, tempat rekreasi dan lain-lain.
- b) Ruang terbuka pasif, adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung kegiatan manusia, antara lain berupa : penghijauan/taman sebagai sumber pengudaraan lingkungan, penghijauan sebagai jarak terhadap rel kereta api dan lain-lain.

RTH kelurahan menurut PerMenPU No. 5/PRT/M/2008, dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m<sup>2</sup> per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Tabel 2.9. Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kelurahan

Jenis Taman	Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
Aktif	70–80%	1) lapangan terbuka; 2) trek lari, lebar 5 m panjang 325 m; 3) WC umum; 4) 1 unit kios (jika diperlukan); 5) kursi-kursi taman.	1) minimal 25 pohon (pohon sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.
Pasif	80 – 90%	1) sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar 1,5–2 m; 2) WC umum; 3) 1 unit kios (jika diperlukan); 4) kursi-kursi taman.	1) minimal 50 pohon (sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.

Sumber : PerMenPU No. 5/PRT/M/2008

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman

pasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Marga No. 076/KPTS/Db/1999 tentang pedoman pemilihan tanaman untuk mereduksi polusi udara ( $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}_x$  dan  $\text{SO}_x$ ).

Untuk mengetahui apakah kondisi udara di lokasi penelitian sehat dan memenuhi standard yang telah ditentukan, maka perlu dilakukan pengukuran kemudian dianalisis berdasarkan standar baku mutu udara ambien nasional. Tabel standar baku mutu udara ambien nasional yakni sebagai berikut (lihat tabel 2.10).

Table 2.10. Baku Mutu Udara Ambien Nasional

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1	$\text{SO}_2$ ( Sulfur Dioksida )	1 Jam 24 Jam 1 Thn	$900 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$ $365 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$ $60 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$	Pararosanalin	Spektrofotometer
2	$\text{CO}$ ( Karbon Monoksida )	1 Jam 24 Jam 1 Thn	$30.000 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$ $10.000 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$	NDIR	NDIR Analyzer
3	$\text{NO}_2$ ( Nitrogen Dioksida )	1 Jam 24 Jam 1 Thn	$400 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$ $150 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$ $100 \mu\text{g} / \text{Nm}^3$	Saltzman	Spektrofotometer

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999

## 2) Taman Rekreasi Dan Olah-Raga

Ruang terbuka menurut SNI 03-1733-2004, merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Setiap unit Kelurahan atau kawasan berpenduduk ( $\approx 30.000$  jiwa) diperlukan taman dan lapangan atau fasilitas olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya. Taman dan lapangan olah raga ini memerlukan lahan seluas  $9.000 \text{ m}^2$  atau dengan standar  $0,3 \text{ m}^2$  per-penduduk, yang sebaiknya berlokasi mengelompok dengan sarana pendidikan.

### c. Prasarana Lingkungan

Prasarana lingkungan yang dibutuhkan agar lingkungan layak, sehat, nyaman dan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan bagi penghuninya terdiri dari : jaringan jalan, jaringan saluran air limbah dan jaringan drainase. Dan dilengkapi dengan utilitas umum untuk pelayanan lingkungan yang terdiri dari jaringan air bersih, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon dan pemadam kebakaran.

Yang menjadi fokus utama permasalahan prasarana lingkungan di Kauman adalah jaringan jalan terkait pengaturan lalu lintas, jaringan saluran air limbah, jaringan drainase dan pembuangan sampah.

### 1) Jaringan Jalan

Jalan perumahan yang baik menurut SNI 03-1733-2004, harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.

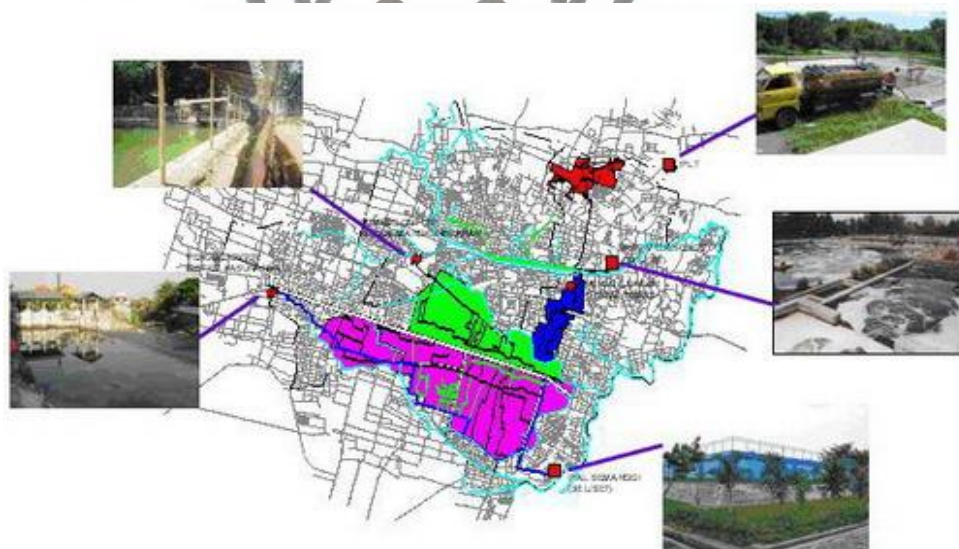
### 2) Jaringan Saluran Air Limbah

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan menurut SNI 03-1733-2004 yakni sebagai berikut.

- 1) septik tank;
- 2) bidang resapan; dan
- 3) jaringan pemipaan air limbah.

Sedangkan persyaratan jaringan air limbah menurut SNI 03-6981-2004 yakni sebagai berikut.

- 1) Dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah kota komunal atau individual sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 2) Air limbah harus melalui sistem pengolahan sebelum dibuang ke perairan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 2.9. Tempat pengolahan limbah *domestic* di Surakarta  
Sumber : <https://goo.gl/images/mP4bsd>



Penanganan Air Limbah rumah tangga (*domestic*) di Kota Surakarta ditangani dengan Sistem Perpipaan yang dilakelola oleh Dinas PDAM Kota Surakarta sejak 19 Juli 1999 (Dinas PDAM Kota Surakarta). Saluran ini dinamakan *interceptor* PDAM. Tempat-tempat pengolahan dipusatkan di beberapa tempat yaitu : di Pucangsawit, Mojosongo, Putri Cempo dan Semanggi. Limbah *domestic* dari rumah tangga disalurkan melalui pipa ke tempat-tempat pengolahan tersebut (lihat gambar 2.9).

Menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, asumsi produksi lumpur tinja 40 lt/org/ thn dan produksi air limbah 85-175 lt/org/thn. Untuk penduduk 120.000 jiwa, dibutuhkan instalasi pengolahan limbah terpadu sistem kolom dengan debit 50 m<sup>3</sup>/hari untuk pelayanan 100.000 jiwa.

Selain limbah domestik Kauman memiliki limbah cair yang berasal dari *home industry* batik. Kawasan Kauman dikenal sebagai kampung batik, sebagian pengusaha melakukan proses produksi di Kauman dan sebagian lagi di luar Kauman. Kawasan ini tidak mempunyai tempat pengolahan air limbah batik, sebagian pengusaha mengolah limbah secara sederhana dan sebagian yang lain langsung disalurkan ke *interceptor* PDAM (Musyawaroh, dkk., 2009 : 4).

Tabel 2.11. Baku Mutu Limbah Cair Industri Tekstil

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)							
		Tekstil Terpadu	Pencucian Kapas Pemintalan Penenunan	Perekatan (sizing) Desizing	Pengikisan Pemasakan (Klering Scouring)	Pengikisan Pemucatan (Blencing)	Pengikisan Merserisasi	Pengikisan Pencelupan (Dyeing)	Pengikisan Pencetakan (Printing)
BOD <sub>5</sub>	60	6	0,42	0,6	1,44	1,08	0,9	1,2	0,36
COD	150	15	1,05	1,5	3,6	2,7	2,25	3,0	0,9
TSS	50	5	0,35	0,5	1,2	0,9	0,75	1,0	0,3
Fenol Total	0,5	0,05	0,004	0,005	0,012	0,009	0,008	0,01	0,003
Krom Total (Cr)	1,0	0,1	-	-	-	-	-	0,02	0,006
Amonia Total (NH <sub>3</sub> -N)	8,0	0,8	0,056	0,08	0,192	0,144	0,12	0,16	0,048
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,03	0,002	0,003	0,007	0,005	0,005	0,006	0,002
Minyak dan lemak	3,0	0,3	0,021	0,03	0,07	0,054	0,045	0,06	0,018
pH	6,0 - 9,0								
Debit limbah maksimum (m <sup>3</sup> /ton produk)		100	7	10	24	18	15	20	6

Sumber : Kep.Men 51/Men/LH/10/1995 lampiran B

Baku mutu limbah cair industri tekstil dan pewarnaan seperti tabel 2.11. Limbah industri tekstil dapat dibuang ke badan air lingkungan apabila memenuhi persyaratan

telah mengandung zat pencemar minimal sesuai dengan Kep.Men 51/Men/LH/10/1995 lampiran B.

### 3) Jaringan Drainase

Drainase merupakan suatu sistem saluran pembuangan yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan dari pemukiman, pabrik, industri, mencegah genangan air dan sebagainya (Qomariah, 2007 : 57). Konsep dasar pengembangan sistem drainase yang berkelanjutan adalah meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. Prioritas utama sistem drainase yang berkelanjutan yakni mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan sehingga air secepatnya bisa mengalir dan seminimal mungkin menggenangi daerah layanan (Muttaqin, 2007 : 116).

Persyaratan jaringan drainase menurut standard SNI 03-6981-2004 yakni sebagai berikut.

- 1) Direncanakan berdasarkan curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah.
- 2) Saluran pembuangan air hujan dapat berupa saluran terbuka atau tertutup.
- 3) Kemiringan saluran minimum 2%.
- 4) Dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan dibuat pada jarak maksimum 50 meter.
- 5) Sistem drainase harus dihubungkan dengan saluran kota, sungai, danau atau laut.
- 6) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan drainase sesuai dengan SK SNI 107/1990/F Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

### 4) Pembuangan Sampah

Persyaratan pembuangan sampah menurut standard SNI 03-6981-2004 yakni sebagai berikut.

- 1) Pengumpulan sampah.
  - a) Kapasitas minimum tempat sampah lingkungan rumah tangga volume 0,02 m sesuai perhitungan pada Lampiran B.
  - b) tempat sampah dibuat dari bahan rapat air;
  - c) penempatan tempat sampah harus mudah dicapai oleh petugas kebersihan, dan tidak mengganggu lalu lintas.
- 2) Pengangkutan sampah

- a) tersedia fasilitas pengangkutan sampah;
  - b) pengangkutan dari tiap-tiap rumah dilakukan maksimum dua hari sekali.
- 3) Pembuangan sampah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara teknik pengelolaan sampah perkotaan dan peraturan mengenai tata cara pengelolaan sampah di pemukiman.

Tempat sampah pada lingkup Kelurahan berupa bak sampah besar, merupakan tempat pembuangan sementara sampah-sampah dari lingkungan RW yang diangkut gerobak sampah, dengan ketentuan sebagai berikut; kapasitas bak sampah besar minimal 12-15 m<sup>3</sup> sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari bak sampah RW ke bak sampah Kelurahan) dan sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari bak sampah Kelurahan ke TPA kota).

## 6. Proposisi Teori

Telah dikemukakan sub bab 1 bahwa konservasi adalah proses pemeliharaan, perawatan, pemugaran serta pengelolaan sebuah tempat untuk mempertahankan signifikansi budayanya yang merupakan simbol dan kenangan dari masa lalu, agar makna kultural yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Upaya konservasi dalam mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dilakukan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya sesuai dengan aslinya tanpa mengubah secara signifikan. Upaya tersebut mencakup interaksi historis, sosial, budaya, politik dan merupakan tanggung jawab yang berkesinambungan. Dalam telaah tersebut belum ada yang membahas aspek kosmologi dan religius.

Pada kondisi empiri di lapangan terdapat keterkaitan yang erat antara faktor sosial-budaya-religius (untuk signifikansi warisan budaya santri), keterkaitan faktor sosial-budaya-ekonomi-religius (untuk signifikansi warisan budaya batik) dan keterkaitan kosmologi-budaya-religius (untuk signifikansi warisan budaya sistem spasial kampung kuno). Perbedaan tersebut terdapat pada hunian abdi dalem ulama (yang memiliki langgar, tanpa langgar, pengusaha batik) dengan hunian pengusaha batik serta sistem spasial kampung kuno yang terkait dengan Kerajaan Mataram Islam dan permukiman Islam. Dari hasil observasi lapangan, terdapat kesenjangan antara teori atau konsep dengan empirik lapangan, sehingga perlu dilakukan eksplorasi dari konservasi pada kelompok hunian dan sistem spasial tersebut di atas.

Berdasarkan kajian teoritik yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya tentang beberapa teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan konservasi, pembangunan berkelanjutan kawasan cagar budaya, serta sosial, budaya, ekonomi, kosmologi, religius masyarakat tradisional jawa, maka dapat disarikan menjadi tiga proposisi yaitu : 1) potensi warisan budaya yang dimiliki oleh sebuah kawasan sehingga perlu dikonservasikan; 2) pengaruh konservasi potensi warisan budaya pada kondisi lingkungan; 3) model konservasi berkelanjutan untuk sebuah kawasan cagar budaya.

a. Proposisi untuk hal-hal yang menjelaskan potensi warisan budaya yang dimiliki oleh kawasan Kauman Surakarta sehingga perlu dikonservasikan, dapat diidentifikasi dengan masih berlangsungnya kegiatan dan pemeliharaan warisan budaya tersebut sampai saat ini.

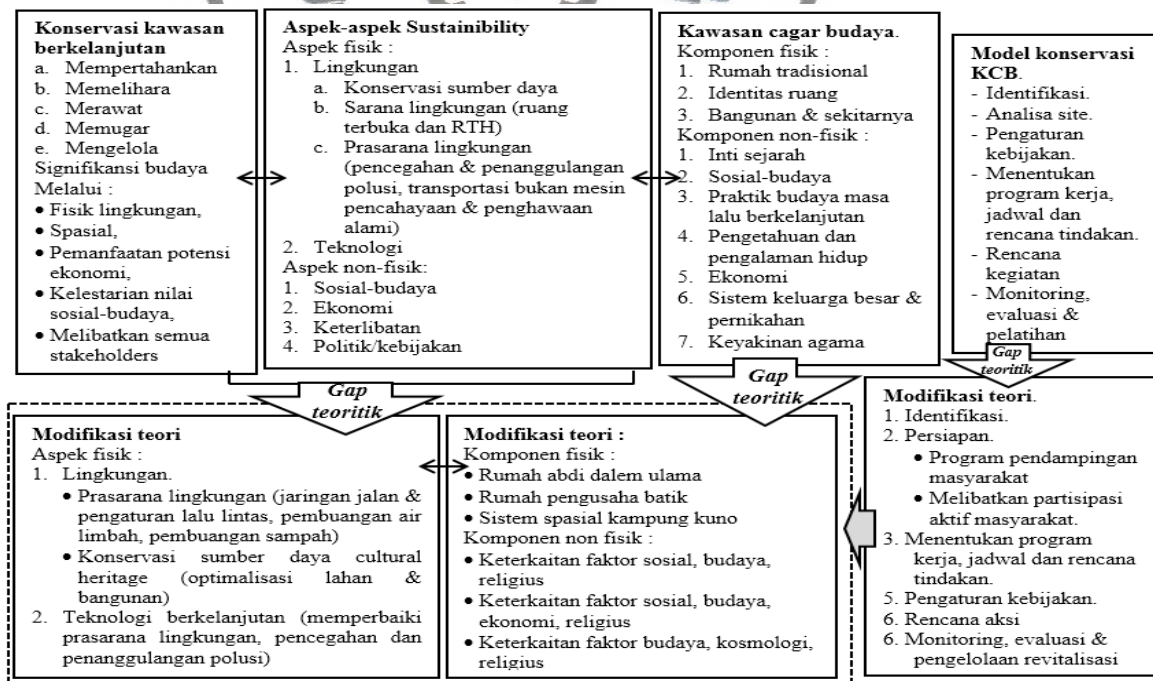
- 1) Kegiatan warisan budaya yang masih berlangsung, artefak serta toponimi yang masih terdapat di Kauman hingga saat ini adalah budaya santri, batik dan sistem spasial kampung kuno.
- 2) Potensi warisan budaya diidentifikasi melalui : 1) komponen fisik meliputi rumah tradisional, inti sejarah, identitas ruang, bangunan dan sekitarnya; 2) komponen non-fisik meliputi peningkatan sosial-budaya, ekonomi, praktik budaya masa lalu dan berkelanjutan, pengetahuan dan pengalaman hidup, sistem keluarga besar dan pernikahan dan keyakinan agama. Teori ini antara lain didukung oleh (Funo, Ferianto & Yamada, 2005 :135-136; Ismail, 2006 : 243; Gunlu 2008 : 3-4; Chun & Bin, 2008 : 1; Bakri, 2015 : 381-382; Azmi, 2016 : 528; Firmansyah, 2016 : 503; Ajayi, 2017 : 13), serta UURI No. 11 tahun 2010; *United Cities and Local Governments*, 2015 : 5; PerMenPU No.18/PRT/M/2010 pasal 1.

b. Proposisi mengenai pengaruh pelestarian potensi pada kondisi fisik dan non fisik lingkungan di Kauman, dikemukakan melalui teori sebagai berikut.

- 1) Faktor-faktor fisik yang berpengaruh pada keberlanjutan lingkungan meliputi kondisi lingkungan dan teknologi; faktor non fisik yang berpengaruh pada keberlanjutan lingkungan meliputi sosial, budaya, ekonomi, keterlibatan dan kebijakan. Teori ini didukung oleh ("*our common future*", 1987 : 41-42; Forum For The Future United Kingdom, 2003 : 13; Aulia, 2005 : 35; Chiotinis, 2006 : 593; Andersson, 2006 : 34; Pisani, 2006 : 92; Agustina, 2007 : 44; Johnson, et. al., 2011 : 7; Saric et. Al., 2013 : 23; Blank, 2012:7; Rahayu, dkk., 2012 : 27; Riddell, 2004:14-15).



- 2) Faktor spesifik yang dimiliki Kauman yakni faktor fisik berupa sumber daya *cultural heritage* dan faktor non-fisik kosmologi-religius.
- 3) Potensi ini dikemukakan dan dikaitkan dengan sosial-budaya, ekonomi, religius dan kosmologi masyarakat tradisional Jawa.
- c. Proposisi mengenai model konservasi berkelanjutan untuk kawasan cagar budaya Kauman Surakarta, dinyatakan melalui teori sebagai berikut.
- 1) Konservasi adalah proses pemeliharaan, perawatan, pemugaran serta pengelolaan sebuah tempat untuk mempertahankan signifikansi budaya. Upaya yang dilakukan mencakup identifikasi, analisa site, pengaturan kebijakan, menentukan program kerja, jadwal dan rencana tindakan, rencana kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelatihan. Teori ini didukung oleh Arslan (2015 : 292), Gur (2015 : 239), Akkam (2012 : 52-53), The Burra Charter (2013 : 10), Wijayanti (2010: 36).
- 4) Program pendampingan kawasan dan partisipasi masyarakat menjadi spesifikasi dari model konservasi berkelanjutan Kauman.
- Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.10.



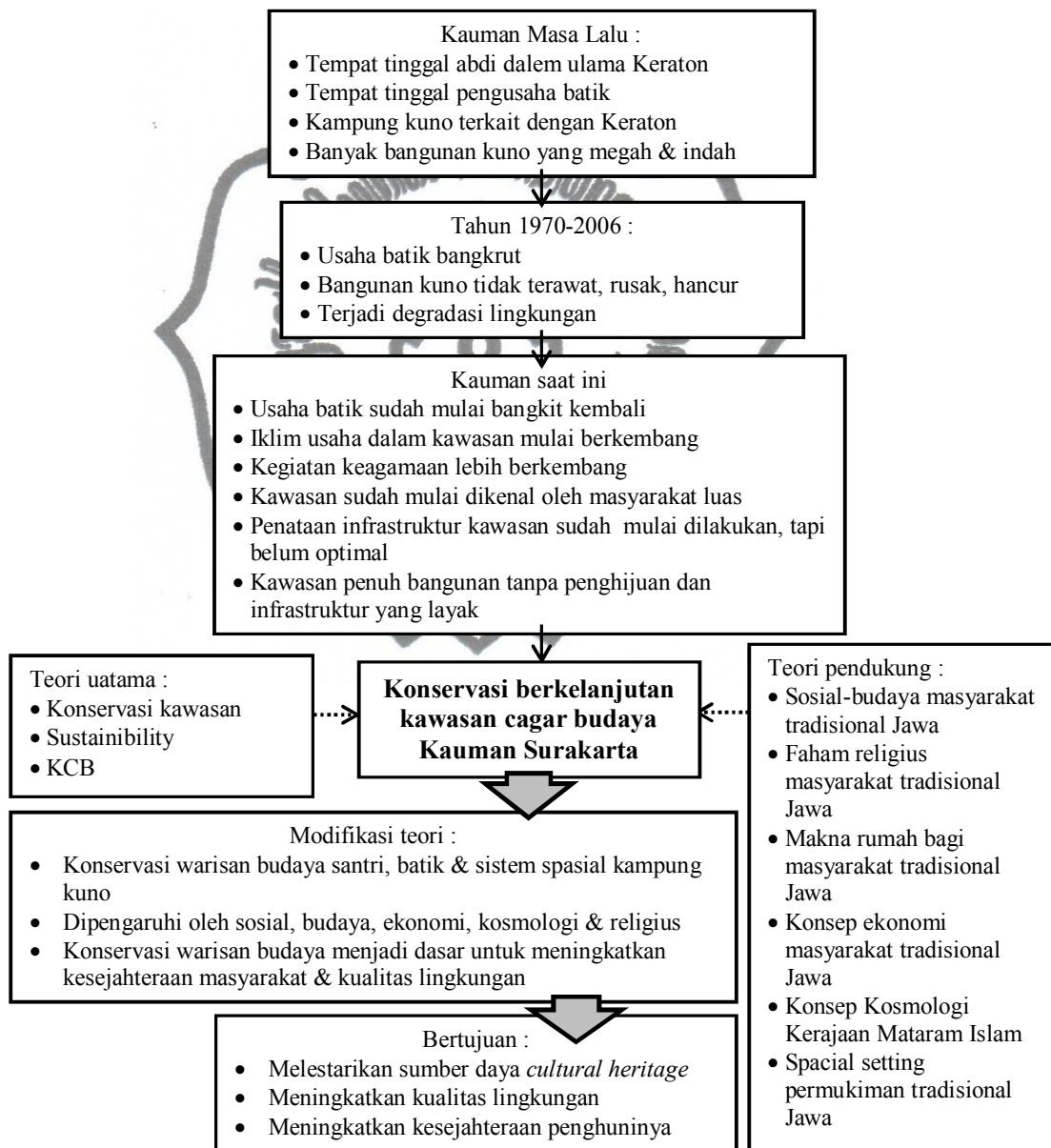
Gambar 2.10. Proposisi Teori

## B. Kerangka Berpikir

Kelurahan Kauman pada pada masa lalu adalah kampung kuno tempat tinggal abdi dalem ulama keraton dan pengusaha batik. Akan tetapi sekitar tahun 1970-2006 usaha batik

hancur, bangunan kuno menjadi terbengkalai dan rusak dan terjadi degradasi lingkungan. Saat ini Kauman telah mulai bangkit kembali, tanpa diikuti oleh infrastruktur lingkungan yang layak. Untuk itu dibutuhkan konservasi berkelanjutan bagi KCB Kauman.

Tujuan konservasi berkelanjutan bagi KCB Kauman adalah untuk melestarikan sumber daya *cultural heritage* (budaya santri, batik dan sistem spasial kampung kuno) yang ada di Kauman, meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan penghuninya (lihat gambar 2.11).



Gambar 2.11. Kerangka pikir penelitian